

EFEKTIVITAS PROGRAM *SUNSET POLICY* SEBAGAI UPAYA PENURUNAN TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KOTA BATU

(STUDI PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BATU)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Gelar Sarjana pada
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**NOVI ANJAR PURWANINGTYAS
NIM. 145030401111015**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG**

2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Efektivitas Program Sunset Policy sebagai Upaya Penurunan
Tunggakan Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Batu

Disusun oleh : Novi Anjar Purwaningtyas

NIM : 145030401111015

Fakultas : Ilmu administrasi

Jurusan : Administrasi Bisnis

Program Studi : Perpajakan

Malang, 10 September 2018

Komisi Pembimbing
Ketua



Rosalita Rachma Agusti, SE., MSA., Ak
NIP. 198708312014042001

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Senin
Tanggal : 24 September 2018
Jam : 11.00 WIB
Skripsi atas nama : Novi Anjar Purwaningtyas
Judul : Efektivitas Program *Sunset policy* sebagai Upaya
Penurunan Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Batu (Studi pada
Kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu)

dan dinyatakan,

LULUS
MAJELIS PENGUJI

Ketua,



Rosalita Rachma Agusti, SE. MSA., Ak
NIP. 19870831 201404 2 001

Anggota,



Nurlita Sukma Alfandia, SE, MA
NIP. 2013048811112001



Damas Dwi Anggoro, SAB., MA
NIP. 2016078906261001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah ini dapat dibuktikan secara jelas terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (UU. Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 70).

Malang, 10 September 2018



Novi Anjar Purwaningtyas
145030401111015

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Novi Anjar Purwaningtyas
Nomor Induk Mahasiswa : 145030401111015
Tempat dan Tanggal Lahir : Jombang, 17 November 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Email : novianjar8@gmail.com
Alamat Asal : Jombang



RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan Formal

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. SD Negeri Carangwulung III | Tahun 2002 – 2008 |
| 2. SMP Negeri 1 Wonosalam | Tahun 2008 – 2011 |
| 3. SMA Negeri 1 Mojoagung | Tahun 2011 – 2014 |
| 4. Universitas Brawijaya | Tahun 2014 – 2018 |

PENGALAMAN ORGANISASI

Staf Himpunan Mahasiswa Perpajakan Biro Administrasi (2016)

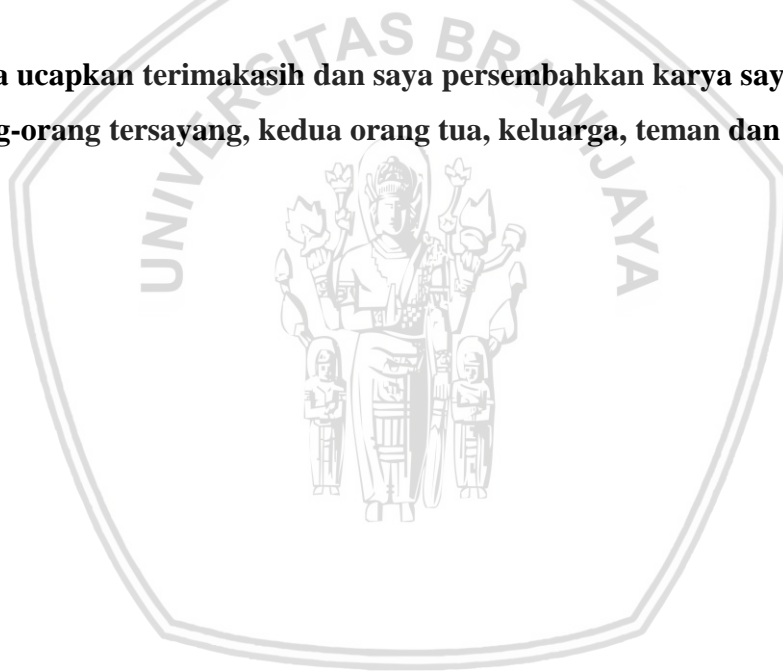
PENGALAMAN MAGANG

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu (2017)

UCAPAN TERIMAKASIH



Saya ucapkan terimakasih dan saya persembahkan karya saya untuk orang-orang tersayang, kedua orang tua, keluarga, teman dan sahabat.



RINGKASAN

Novi Anjar Purwaningtyas, 2018, **Efektivitas Program *Sunset Policy* sebagai Upaya Penurunan Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Batu**, Rosalita Rachma Agusti, SE., MSA., Ak, 140 Hal + xiii

Sejak adanya peralihan wewenang pengelolaan PBB-P2 kepada Pemerintah Kota Batu, maka semua basis penerimaan dari sektor PBB-P2 menjadi hak pemerintah Kota Batu, namun konsekuensi dari hal tersebut adalah nilai piutang atas pengalihan tersebut masuk dalam neraca pemerintah Kota Batu dan menjadi beban piutang yang harus ditagih. Hal tersebut membuat Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu sebagai badan pengelola pajak daerah khususnya PBB-P2 membuat inisiatif untuk menangani masalah tersebut, yakni dengan menerbitkan *sunset policy* PBB-P2 guna menurunkan tunggakan PBB-P2 di Kota Batu.

Penelitian disusun untuk mengetahui efektivitas program *sunset policy* di dalam menurunkan nilai tunggakan PBB-P2 di Kota Batu, serta untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan program tersebut

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program *sunset policy* PBB-P2 di Kota Batu belum efektif apabila dilihat dari indikator efektivitas Budiani (2007). Jika dilihat dari sosialisasi program sudah dilaksanakan dengan baik, karena sudah dilakukan sosialisasi langsung dan tidak langsung. Namun, jika dilihat dari indikator sasaran program dan pemantauan program belum berjalan dengan baik. Hal ini menyebabkan tujuan dari program *sunset policy* PBB-P2 di Kota Batu masih belum tercapai. Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan program ini berasal dari eksternal dan internal.

Rekomendasi yang dapat peneliti berikan untuk menunjang pelaksanaan program *sunset policy* PBB-P2 yang selanjutnya yaitu : 1) pihak BKD Kota Batu lebih meningkatkan koordinasi dengan para pihak terkait terutama tokoh masyarakat dan aparatur desa, 2) perlu diusahakan pencatatan data piutang PBB-P2 dengan akurat, agar *update* data tunggakan PBB-P2 bisa terus diikuti oleh pihak BKD, 3) pihak BKD perlu melakukan penagihan aktif terhadap PBB-P2 4) pihak BKD Kota Batu perlu memberikan sanksi bagi wajib pajak yang masih enggan melakukan kewajiban perpajakannya 5) pihak BKD Kota Batu perlu memenuhi kebutuhan dari segi sumber daya.

Kata Kunci : Efektivitas *sunset policy* PBB-P2, faktor pendukung, faktor penghambat

SUMMARY

Novi Anjar Purwaningtyas, 2018, *The Effectiveness of Sunset Policy Program as an Effort to Reduce “Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2)” Arrears in Batu City*, Rosalita Rachma Agusti, SE., MSA., Ak, 140 pages + xiii

Since the transfer of PBB-P2 to the Batu City government, then all the revenue base from PBB-P2 sector became the right of Batu City government. But the consequence of that is the value of the government receivables and became the burdening accounts receivable to be collected. It has made the Regional Finance Agency/BKD Batu City as the regional tax management agency especially the PBB-P2 made an initiative to deal with the problem, with published a sunset policy to reduce PBB-P2 arrears in Batu City.

This research was prepared to determine the effectiveness of sunset policy program in reducing the value of PBB-P2 arrears in Batu City, also to know well the factors that support and the obstacle of implementation the program.

This research type used qualitative with descriptive approach. The data collected through interviews and documentation. The data analysis used interactive data model analysis of Miles and Huberman which include data collection, data reduction, data presentation, and conclusion.

The results showed that the sunset policy program in Batu City has not been effective when viewed from effectiveness of Budiani (2007). When viewed from indicators of program socialization has been implemented well by existence of direct and indirect socialization. However, if seen from indicators program target and program monitoring is still not going well. This cause the purpose of sunset policy program in Batu City still can not be achieved. Beside of that, the support and the obstacle factors of program implementation might came from external and internal sides.

The recommendation that given by researcher to support the next PBB-P2 's sunset policy program are : 1) The BKD Batu City must be improves the coordination with the program related especially the village apparatus, 2) It is necessary to record accurate data of PBB-P2 accounts so that the update of PBB-P2 arrears data can be followed by BKD Kota Batu 3) The BKD need to collect taxes actively 4) The BKD Kota Batu need to give sanctions for taxpayers who are still have not paid their taxes 5) The program needs must be completed, especially the resources.

Keywords : *Effectiveness PBB-P2's sunset policy, the support and the obstacle factors*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Program *Sunset Policy* sebagai Upaya Penurunan Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan di Kota Batu. Skripsi merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS. selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
2. Bapak Dr. Mochammad Al Musadieq, MBA selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
3. Ibu Dr. Saparila Worokinasih, S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
4. Ibu Rosalita Rachma Agusti, SE. MSA. Ak selaku Komisi Pembimbing yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan kepada peneliti dalam menyusun skripsi hingga selesai

5. Bapak dan Ibu Kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu yang telah berkenan memberikan izin kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian skripsi dan memberikan informasi terkait objek penelitian.
6. Kedua orang tua, Bapak Pujiyanto dan Ibu Rusmiani yang senantiasa memberikan doa dan dukungan.
7. Seluruh teman dan sahabat yang turut mendukung dalam penyelesaian skripsi ini, Devi, Mega, Hinda, Ajeng Sella, Mila, Barlian, Merista, Cici, Inggita, Septi.

Demi kesempurnaan skripsi ini, peneliti mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Malang, 10 September 2018

Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	i
TANDA PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kontribusi Penelitian	7
E. Sistematika Pembahasan	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Empiris	10
B. Tinjauan Teoritis	15
1. Konsep Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal	15
a. Otonomi Daerah	15
b. Desentralisasi Fiskal	17
2. Konsep Kebijakan Dasar Perpajakan	19
a. Konsep Dasar Perpajakan	19
b. Timbul dan Hapusnya Utang Pajak	20
c. Perlawanan terhadap Pajak	22
3. Konsep Kebijakan PBB Perdesaan & Perkotaan (PBB-P2)	23
a. Ruang Lingkup PBB-P2	23
b. Penetapan dan Ketetapan PBB-P2	25
c. Penagihan PBB-P2	26
4. Konsep Penghapusan Sanksi Administrasi	27
a. Sanksi Pajak	27
b. Pengampunan Pajak	28
c. Penghapusan Sanksi Denda Pajak	29

5. Konsep Efektivitas	32
a. Pengertian Efektivitas	32
b. Ukuran Efektivitas	33
6. Analisis SWOT	35
a. Definisi Analisis SWOT	35
b. Analisis Lingkungan Organisasi	37
7. Kerangka Pemikiran.....	44

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	46
B. Fokus Penelitian	47
C. Lokasi dan Situs Penelitian	48
D. Sumber Data.....	49
E. Teknik Pengumpulan Data.....	51
F. Instrumen Penelitian.....	52
G. Metode Analisis Data.....	53
H. Uji Keabsahan Data.....	55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Badan Keuangan Daerah Kota Batu.....	57
B. Penyajian Data Fokus Penelitian.....	65
1. Efektivitas Program <i>sunset policy</i> PBB-P2.....	66
2. Faktor yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan program <i>sunset policy</i> PBB-P2 di Kota Batu	70
3. Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program <i>sunset policy</i> PBB-P2 di Kota Batu	77
C. Analisis Data Penelitian	83
1. Efektivitas Program <i>sunset policy</i> PBB-P2.....	83
2. Faktor yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan program <i>sunset policy</i> PBB-P2 di Kota Batu	91
3. Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program <i>sunset policy</i> PBB-P2 di Kota Batu	97

BAB V PENUTUP

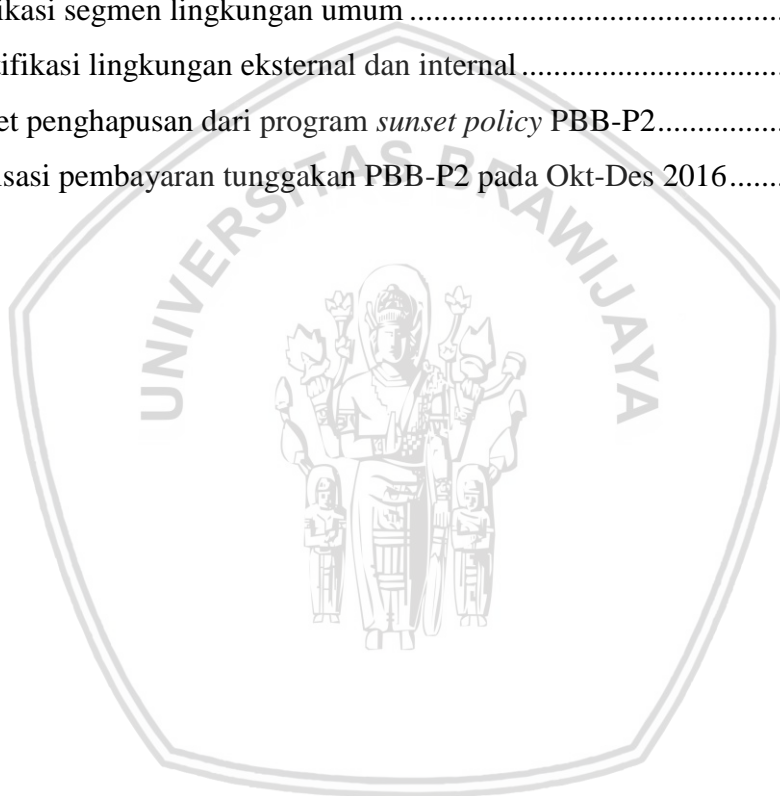
A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	104

DAFTAR PUSTAKA 106

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No. Judul	Halaman
1. Nilai peralihan piutang PBB-P2 dari KPP Pratama Batu ke Dispenda Kota Batu	3
2. Penelitian terdahulu.....	13
3. Implikasi segmen lingkungan umum	37
4. Identifikasi lingkungan eksternal dan internal	40
5. Target penghapusan dari program <i>sunset policy</i> PBB-P2.....	66
6. Realisasi pembayaran tunggakan PBB-P2 pada Okt-Des 2016.....	67



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1.	Kerangka pemikiran	45
2.	Komponen dalam analisis data (<i>interactive model</i>)	54



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah sebagai *agent of development* memiliki peran penting dalam pembangunan suatu negara. Menurut Pohan (2015:1) pembangunan pada hakikatnya adalah “Proses pembaruan berkesinambungan untuk mencapai suatu keadaan yang dianggap lebih baik”. Fitriyaningsih (2016) menyatakan bahwa dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan pembangunan diwujudkan dengan adanya penyelenggaraan otonomi daerah.

Pamuji (2014) menyatakan bahwa “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Purwaningsih, dkk (2012) menyatakan bahwa untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah, maka pemerintah pusat memberikan sumber pembiayaan yang memadai kepada pemerintah daerah. Hal ini tertuang dalam kebijakan desentralisasi fiskal. Saragih (2003:83) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal adalah “Proses pendistribusian anggaran dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan”.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia sebagaimana tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33 tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana peraturan tersebut menyatakan bahwa sumber-sumber pembiayaan daerah yang utama dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Desentralisasi keuangan sebagai salah satu bentuk kebijakan fiskal telah disahkan pada tanggal 15 September 2009 berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) (pajak.go.id). Undang-Undang tersebut diantaranya mengamanahkan untuk mengalihkan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang awalnya merupakan pajak pusat menjadi pajak daerah. Pengalihan PBB-P2 tersebut membuat sepenuhnya pengelolaan PBB-P2 yang meliputi kegiatan pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2 diselenggarakan oleh pemerintah daerah (pajak.go.id).

Menurut Siahaan (2016:553) “Pajak Bumi dan Bangunan (PPB) Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan”. Menurut Dharmawan (2016) dengan adanya pengalihan kewenangan pengelolaan PBB-P2 ke daerah menjadi salah satu penyebab adanya piutang pemerintah daerah, hal ini pula terjadi di Kota Batu. Pengalihan pengelolaan PBB-P2 di Kota Batu dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2013. Pengalihan tersebut dilakukan berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Data Piutang PBB-P2 dan Aset Sitaan Nomor : BA-04/WPJ.12/KP.04/2013 antara Kepala Kantor Pelayanan Pajak

(KPP) Pratama Batu kepada Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Batu. Nilai peralihan piutang tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Nilai peralihan piutang PBB-P2 dari KPP Pratama Batu ke Dispenda Kota Batu

No	Tahun Pajak	Nilai Piutang PBB-P2 (Rp)
1	1996	298.541.768
2	1997	250.549.819
3	1998	587.529.651
4	1999	560.712.234
5	2000	1.044.811.838
6	2001	983.514.710
7	2002	476.672.077
8	2003	526.715.647
9	2004	581.442.120
10	2005	475.905.868
11	2006	683.481.231
12	2007	429.712.776
13	2008	836.327.111
14	2009	1.237.182.221
15	2010	1.384.212.993
16	2011	1.453.638.846
17	2012	2.953.626.375
JUMLAH		14.764.576.225

Sumber : Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu (2017)

Sejak adanya peralihan wewenang pengelolaan PBB-P2 kepada Pemerintah Kota Batu, maka semua basis penerimaan dari sektor PBB-P2 menjadi hak pemerintah Kota Batu. Konsekuensi dari hal tersebut adalah nilai piutang yang dimaksud di atas masuk dalam neraca piutang pemerintah Kota Batu. Hal ini menyebabkan pengalihan piutang tersebut menjadi beban piutang yang harus

ditagih. Memperhatikan atas data piutang sebagaimana tertuang dalam BAST terhitung sejak 1996 sampai dengan tahun 2012 serta adanya tunggakan PBB-P2 setiap tahun, maka pemerintah Kota Batu membuat inovasi untuk mempercepat penurunan angka piutang PBB-P2 dengan program *sunset policy*.

Sunset policy menurut Waluyo dalam Nurkhafidloh (2017) berangkat dari konsep pengampunan pajak (*tax amnesty*), yang artinya “Kebijakan pemerintah dalam bidang perpajakan dalam bentuk pengampunan pajak terhadap wajib pajak dengan memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang oleh wajib pajak”. Suryarini dan Anwar dalam Nurkhafidloh (2017) menyatakan bahwa

“Kebijakan *sunset policy* hanya memberikan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, sedangkan pokok utang pajaknya tetap harus dilunasi. Pidana fiskal juga gugur jika wajib pajak melunasi pokok utang pajak yang belum dilaporkan atau belum dibayarkan untuk tahun-tahun pajak yang mendapat fasilitas *sunset policy* dan pemberian *sunset policy* ini jangka waktunya dibatasi”.

Sunset policy PBB-P2 di Kota Batu tertuang dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penghapusan Sanksi Administratif atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Masa Pajak sampai dengan Tahun 2015. Peraturan tersebut dibuat berdasar pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 15/PJ/2004 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 2/PJ.6/2001 tentang usulan penghapusan PBB, serta Peraturan Walikota Batu Nomor 60 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan. Peraturan Walikota Batu Nomor 47 Tahun 2016 tersebut merupakan bentuk insentif dari pemerintah Kota Batu kepada wajib pajak PBB-P2 untuk memudahkan masyarakat dalam membayar tunggakan pajaknya. Program

sunset policy ini diberlakukan pada bulan Oktober 2016 s.d Desember 2016, dan sasaran dari program *sunset policy* adalah wajib pajak yang mempunyai tunggakan PBB-P2 dalam masa pajak sampai dengan 2015.

Avitasari (2016) menyatakan bahwa program atau kebijakan yang dijalankan dalam suatu instansi perlu adanya pengukuran untuk mengetahui tingkat keberhasilannya, oleh karena itu diperlukan suatu pengukuran efektivitas. Menurut Siagani (2001:24) “Efektivitas menunjukkan sejauh mana keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, jika hasil kegiatan mendekati sasaran yang telah diharapkan maka semakin tinggi efektivitasnya”. Budiani (2007) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan indikator ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program.

Ketepatan sasaran program menilai sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Indikator sosialisasi program berkenaan dengan penyampaian program kepada masyarakat khususnya peserta program terkait. Adapun indikator tujuan program berkaitan kesesuaian antara hasil dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan indikator pemantauan berhubungan dengan ada tidaknya pemantauan setelah program dijalankan sebagai bentuk perhatian terhadap program.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas program *sunset policy* di Kota Batu dalam menurunkan nilai tunggakan PBB-P2 serta menganalisis faktor yang menjadi dukungan dan hambatan dalam penerapan program *sunset policy* PBB-P2 tersebut. Alasan peneliti memilih PBB-P2 sebagai objek penelitian karena

di Kota Batu akan diselenggarakan *sunset policy* PBB-P2 jilid 2, sehingga dirasa perlu menganalisis efektivitas dan kendala-kendala yang mungkin timbul selama proses penerapan program *sunset policy* PBB-P2 dimana hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan oleh pemerintah sebagai *policy maker* dalam membuat dan memutuskan kebijakan yang serupa di masa mendatang. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut terkait penerapan dan faktor-faktor yang mempengaruhi program *sunset policy* PBB-P2 di Kota Batu dengan mencari dan mendapatkan teori-teori yang dapat mengungkapkannya. Oleh karena itu, skripsi ini berjudul **“Efektivitas Program *Sunset Policy* sebagai Upaya Penurunan Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Batu (Studi pada Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Batu)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana efektivitas program *sunset policy* dalam menurunkan nilai tunggakan PBB-P2 di Kota Batu ?
2. Apa yang menjadi faktor pendukung program *sunset policy* dalam menurunkan nilai tunggakan PBB-P2 di Kota Batu ?
3. Apa yang menjadi faktor penghambat program *sunset policy* dalam menurunkan nilai tunggakan PBB-P2 di Kota Batu ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui efektivitas program *sunset policy* dalam menurunkan nilai tunggakan PBB-P2 di Kota Batu
2. Untuk mengetahui faktor pendukung program *sunset policy* dalam menurunkan nilai tunggakan PBB-P2 di Kota Batu
3. Untuk mengetahui faktor penghambat program *sunset policy* dalam menurunkan nilai tunggakan PBB-P2 di Kota Batu

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut :

1. Kontribusi secara Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pemahaman lebih dalam tentang efektivitas program *sunset policy* PBB-P2 dan dapat digunakan sebagai bahan informasi atau acuan di masa mendatang.

2. Kontribusi secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Batu dalam meningkatkan kualitas penerapan kebijakan daerah, terutama penerapan program *sunset policy* yang akan datang.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya mengenai mengenai penerapan program *sunset policy* terutama program *sunset policy* PBB-P2.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama menguraikan tentang latar belakang masalah yang menjadi topik penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika laporan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua menguraikan tentang tinjauan empiris yang berkaitan dengan penelitian terdahulu dan tinjauan teoritis yang berkaitan dengan teori sebagai landasan ilmiah yang relevan dengan permasalahan serta mendukung dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

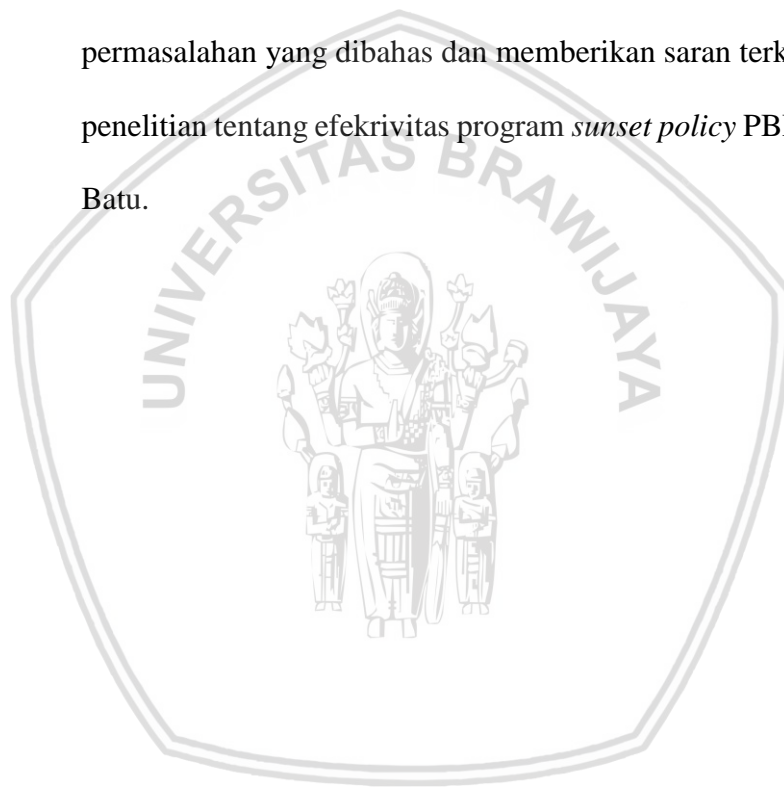
Bab ketiga menguraikan tentang metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, metode analisis data, dan metode keabsahan data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab keempat menguraikan tentang gambaran umum tentang lokasi penelitian, penyajian data dan hasil penelitian, serta analisis utama yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Bab kelima menguraikan kesimpulan berdasarkan pokok dari permasalahan yang dibahas dan memberikan saran terkait dari hasil penelitian tentang efektivitas program *sunset policy* PBB-P2 di Kota Batu.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

Berikut ini akan diuraikan beberapa hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi bagi peneliti, meliputi :

1. Jamil (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Efektivitas Penerapan *Tax Amnesty* di Indonesia”, bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas pajak, khususnya penerimaan pajak dan kepatuhan pajak di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif berusaha menganalisis sumber-sumber yang berhubungan dengan penerapan *tax amnesty*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *tax amnesty* belum efektif, dan pemerintah perlu mencari solusi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pajak serta memperbaiki sistem penerapan pajak kebijakan yang tepat untuk meningkatkan efektivitas penerapan pajak di Indonesia.
2. Kodir (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Efektivitas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pemberian Keringanan dan Insentif Pajak Daerah untuk Rakyat Jawa Timur Tahun 2015”, bertujuan untuk mengetahui efektivitas Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 53 Tahun 2015 dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Kantor SAMSAT Kenjeran Surabaya dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 53 Tahun 2015 serta upaya Kantor SAMSAT Kenjeran Surabaya dalam menangani kendala tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

pelaksanaan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 53 Tahun 2015 belum efektif, adapun beberapa kendala yang dihadapi adalah kelangkaan material STNK dan Plat Nomor (Sarana Prasarana) serta budaya hukum (kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat masih rendah).

3. Hendrawan (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Efektivitas Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.011/2011 terhadap Pihak importir Film Blu-Ray yang Digunakan Untuk Kepentingan Pribadi”, bertujuan untuk mengetahui efektivitas pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No 102/PMK.011/2011 terhadap Pihak Importer Film *Blu-Ray* yang Digunakan untuk Kepentingan Pribadi dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Kota Malang dalam upaya meningkatkan pengelolaan impor film *blu-ray*. Metode yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Keuangan No 102/PMK.011/2011 Pasal 2 masih kurang efektif yang disebabkan karena faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum dan faktor kesadaran masyarakat akan pajak. Adapun kendala yang dihadapi oleh KPPBC Kota Malang dalam meningkatkan pengelolaan impor film *blu-ray* adalah tingkat kesadaran masyarakat yang rendah akan kewajiban pajaknya, ketidaktahuan para importir mengenai keseluruhan kewajiban mereka, kurangnya pengawasan oleh pemerintah, pembatasan kewenangan instansi hingga kurangnya fasilitas yang memadai.

4. Rini (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Efektivitas Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kota Kediri”, bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas peraturan terkait, menguji dan menemukan kendala serta menganalisa upaya untuk mengatasi kendala dalam pemungutan BPHTB berdasarkan Perwali Nomor 47 Tahun 2013. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kota Kediri tidak efektif untuk menjadi dasar pemungutan BPHTB di Kota Kediri, hal tersebut dikarenakan faktor hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan yang masih belum baik.
5. Ningrum (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Efektivitas Hukum Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terkait dengan Peralihan Hak Milik atas Jual Beli Tanah dan Bangunan”, bertujuan untuk mengetahui efektivitas hukum dalam penengenaan BPHTB dan mendiskripsikan upaya mengatasi hambatan dalam pengenaan BPHTB di Kota Batu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenaan BPHTB di Kota Batu belum efektif karena belum adanya payung hukum yang jelas, seperti belum adanya tata cara pembayaran BPHTB secara rinci dan jelas.

Ketidakefektivan juga terjadi karena lemahnya koordinasi antar *stakeholder* terkait.

Kelima penelitian terdahulu sebagaimana disebut di atas, lebih lanjut dapat digambarkan melalui tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Jamil (2017) <i>“Efektivitas Penerapan Tax Amnesty di Indonesia”</i>	- Penelitian bertujuan untuk mengkaji efektivitas program - Metode penelitian kualitatif diskriptif	Jamil (2017) mengukur efektivitas menggunakan standar efektivitas pajak (Triantoro, 2007), sedangkan peneliti menggunakan efektivitas program (Budiani, 2007)
2	Kodir (2016) <i>“Efektivitas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pemberian Keringanan dan Insentif Pajak Daerah untuk Rakyat Jawa Timur Tahun 2015”</i>	Penelitian bertujuan untuk mengkaji efektivitas	- Kodir (2016) mengukur efektivitas menggunakan standar efektivitas hukum (Soekanto, 2006), sedangkan peneliti menggunakan efektivitas program (Budiani, 2007). - Peneliti Kodir (2016) menggunakan jenis penelitian hukum empiris, sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif diskriptif.
3	Hendrawan (2016) <i>“Efektivitas Pasal 2 Peraturan Menteri</i>	Penelitian bertujuan untuk mengkaji efektivitas	- Hendrawan (2016) mengukur efektivitas menggunakan standar

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	<i>Keuangan No. 102/PMK.011/2011 terhadap Pihak importir Film Blu-Ray yang Digunakan Untuk Kepentingan Pribadi”</i>		efektivitas hukum (Soekanto, 2006), sedangkan peneliti menggunakan efektivitas program (Budiani, 2007). - Peneliti Hendrawan (2016) menggunakan jenis penelitian hukum empiris, sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif diskriptif.
4	Rini (2015) “Efektivitas Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kota Kediri”	Penelitian bertujuan untuk mengkaji efektivitas	- Rini (2015) mengukur efektivitas menggunakan standar efektivitas hukum (Soekanto, 2006), sedangkan peneliti menggunakan efektivitas program (Budiani, 2007) - Peneliti Rini (2015) menggunakan jenis penelitian hukum empiris, sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif diskriptif.
5	Ningrum (2013) “Efektivitas Hukum Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Penelitian bertujuan untuk mengkaji efektivitas	- Jamil (2013) mengukur efektivitas menggunakan standar efektivitas hukum (Soekanto, 2006), sedangkan peneliti

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	<i>terkait dengan Peralihan Hak Milik atas Jual Beli Tanah dan Bangunan”</i>		menggunakan efektivitas program (Budiani,2007) - Peneliti Ningrum (2013) menggunakan jenis penelitian hukum empiris, sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif diskriptif.

Sumber : *Data Diolah Peneliti (2018)*

B. Tinjauan Teoritis

1. Konsep Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal

a. Otonomi Daerah

Otonomi daerah di Indonesia telah dilaksanakan sejak 1 Januari 2001 (kemenkeu.go.id). Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan beberapa instrumen regulasi yang mendukung penyelenggaraan otonomi daerah. Ketentuan Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan definisi bahwa konsep otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Smith dikutip Kaho dalam Muin (2014) menyatakan bahwa suatu daerah dikatakan sebagai daerah otonom apabila memiliki atribut sebagai berikut :

- 1) Mempunyai urusan tertentu yang disebut urusan rumah tangga daerah; urusan rumah tangga daerah ini merupakan urusan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah;
- 2) Urusan rumah tangga daerah itu diatur dan diurus/diselenggarakan atas inisiatif/prakarsa dan kebijaksanaan daerah itu sendiri;
- 3) Untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah tersebut, maka daerah memerlukan aparatur sendiri yang terpisah dari aparatur pemerintah pusat, yang mampu menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri; dan
- 4) Mempunyai sumber keuangan sendiri yang dapat menghasilkan pendapatan dalam rangka penyelenggaraan rumah tangga daerahnya.

Salam dalam Muin (2014) menyatakan bahwa faktor yang dapat memprediksi keberhasilan otonomi daerah adalah fungsi dan tugas pemerintahan, kemampuan penguatan pajak daerah, bidang tugas administrasi, jumlah pelimpahan kewenangan, besarnya anggaran belanja, wilayah, ketergantungan keuangan, dan personil.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah merupakan suatu hak atau kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya menurut prakarsa sendiri berdasarkan dan aspirasi masyarakat. Ciri utama suatu daerah berhasil melaksanakan otonomi daerah terletak pada kemampuan keuangan daerah, serta rendahnya tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Kemampuan keuangan daerah diartikan sebagai bentuk kemampuan suatu daerah untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola, dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya, sedangkan rendahnya tingkat

ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat memiliki makna bahwa daerah mampu mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerahnya.

b. Desentralisasi Fiskal

Ketentuan pasal 1 ayat 8 Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa desentralisasi adalah “Penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi”. Mengingat kondisi geografis, kompleksitas perkembangan masyarakat, kemajuan struktur dan budaya lokal, serta adanya tuntutan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintah, dan mempertimbangkan fakta bahwa tidak semuanya urusan pemerintah dapat diselenggarakan secara sentralistik, maka saat ini desentralisasi telah menjadi asas penyelenggaraan pemerintah yang telah diterima secara universal. Litvack dalam Sari (2016) menyatakan bahwa salah satu bentuk desentralisasi yakni desentralisasi fiskal.

Desentralisasi fiskal mengandung makna bahwa dalam upaya mendukung penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah, maka daerah diberikan kewenangan dan keleluasaan untuk mengatur dan mendayagunakan keuangan daerahnya sendiri serta didukung dengan dana perimbangan dari pemerintah pusat. Saragih (2008:83) menyatakan bahwa

“Desentralisasi fiskal adalah proses pendistribusian anggaran dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan”.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan dari pemerintah

pusat kepada pemerintah daerah guna membiayai rumah tangga daerah serta peningkatan pelayanan publik.

Prinsip pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia pada hakikatnya sejalan dengan pengalaman negara-negara lain dalam melakukan desentralisasi (Sari, 2016). Mardiasmo dalam Roy dikutip oleh Sari (2016) menyatakan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia mempunyai prinsip dan tujuan sebagai berikut :

- 1) Mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*vertical fiscal imbalance*) dan antara daerah (*horizontal fiscal imbalance*).
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah.
- 3) Meningkatkan efisiensi peningkatan sumber daya nasional.
- 4) Tata kelola, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian transfer ke daerah yang tepat sasaran.
- 5) Mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro.

Desentralisasi fiskal dalam tataran kebijakan yang lebih aplikatif menurut Bahl and Linn dalam Sari (2016) yakni :

“Diwujudkan melalui pemberian sejumlah transfer dana langsung dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam rangka memenuhi asas desentralisasi, pemberian dana yang dilakukan oleh kementerian/lembaga melalui mekanisme dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta memberikan diskresi kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi sesuai dengan kewenangannya”.

Pengalihan pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Bentuk kebijakan tersebut dituangkan ke dalam Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini adalah titik balik dalam pengelolaan BPHTB dan PBB-P2, karena dengan pengalihan ini maka kegiatan

proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) (pajak.go.id).

Tujuan pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah sesuai dengan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah :

- 1) Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah,
 - 2) Memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah),
 - 3) Memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah,
 - 4) Memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah, dan
 - 5) Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah.
- (pajak.go.id)

2. Konsep Kebijakan Dasar Perpajakan

a. Konsep Dasar Perpajakan

1) Definisi Pajak

Menurut Soemitro dalam Sumarsan (2015:3) pajak adalah “Peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”.

Sedangkan pengertian pajak menurut Andriani dalam Sumarsan (2015:3), yaitu

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib masyarakat kepada Negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang, dimana masyarakat sebagai pembayar pajak tidak memperoleh imbal balik secara langsung, dan hasil dari penerimaan pajak digunakan untuk pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2) Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2014:3) terdapat 2 (dua) fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

a) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

b) Fungsi *Regularend* (pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

b. Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

1) Timbulnya Utang Pajak

Mardiasmo (2011:8) menyebutkan “ada 2 (dua) ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak, yaitu ajaran formil dan ajaran materiil”.

a) Ajaran Formil

Ajaran Formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikelurkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus (pemerintah). Penentuan kewajiban perpajakan seorang wajib pajak dapat diketahui dalam surat ketetapan pajak tersebut. Ajaran ini diterapkan pada *official assessment system*.

b) Ajaran Matriil

Ajaran matriil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang perpajakan. Dalam ajaran ini, seseorang akan secara aktif menentukan apakah dirinya dikenakan pajak atau tidak, sesuai dengan keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada *self assessment system*.

2) Hapusnya Utang Pajak

Dalam Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa :

“Suatu perikatan hapus karena pembayaran, karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, karena pembaharuan hutang, karena perjumpaan hutang atau kompensasi, karena percampuran hutang, karena pembebasan hutang, karena musnahnya barang yang terhutang, karena kebatalan atau pembatalan, karena berlakunya suatu syarat pembatalan, atau karena lewat waktu”.

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1381 di atas, Pasal tersebut mengatur bahwa pembebasan utang (penghapusan/berakhirnya piutang) dapat dilakukan oleh pemilik piutang guna menghapuskan perikatan/perjanjian piutang. Walaupun tidak dijelaskan secara jelas ditujukan kepada pemerintah pusat/daerah sebagai pemilih utang,

ketentuan tersebut dapat digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah dalam menghapuskan piutang yang menjadi wewenang pemerintah pusat/daerah.

Mardiasmo (2011:8) menyebutkan bahwa utang pajak akan berakhir atau terhapus jika terjadi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pembayaran
- 2) Kompensasi
- 3) Daluwarsa
- 4) Pembebasan dan penghapusan

c. **Perlawanan terhadap Pajak**

Sumarsan (2015:8) menyebutkan bahwa perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi perlawanan pasif dan perlawanan aktif.

1) Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif yakni “Suatu hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi. Misalnya dalam hal pencatatan/pembukuan yang sulit dilakukan oleh wajib pajak menyebabkan pembayaran pajaknya lebih kecil”.

2) Perlawanan aktif

Perlawanan aktif adalah “Perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak”.

Metode perlawanan aktif ada 3 (tiga), yaitu : Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*), Pengelakan Pajak (*Tax Evasion*), dan Melalaikan Pajak.

a) Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Dalam penghindaran pajak ini, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang sekalipun kadang-kadang dengan jelas menafsirkan undang-undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuatan undang-undang.

b) Pengelakan Pajak (*Tax Evasion*)

Tindakan pengelakan pajak (*tax evasion*) merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak/mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya.

c) Melalaikan Pajak

Melalaikan pajak adalah tidak melakukan kewajiban perpajakan yang seharusnya dilakukan. Contoh : menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas-formalitas yang harus dipenuhi oleh wajib pajak.

3. Konsep Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2)

a. Ruang Lingkup PBB-P2

1) Definisi PBB-P2

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh

orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

2) Subjek dan wajib pajak PBB-P2

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Sementara itu, wajib pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Hal ini berarti pada pengenaan PB-P2, subjek pajak dan wajib pajak berada pada diri orang yang sama.

3) Kedaluwarsa Penagihan PBB-P2

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hak pemerintah untuk melakukan penagihan PBB-P2 akan kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. Walaupun demikian, dalam keadaan tertentu kadaluwarsa penagihan PBB-P2 dapat ditangguhkan, yaitu apabila kepada wajib pajak diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

b. Penetapan dan Ketetapan PBB-P2

1) Penetapan PBB-P2

Menurut Siahaan (2016:565) sistem pemugutan pajak yang diterapkan dalam PBB-P2 adalah penetapan oleh kepala daerah (*official assessment*). Penetapan pajak oleh kepala daerah diwujudkan dalam bentuk penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sebagai sarana untuk menagih besarnya pajak terutang. Berdasarkan data objek dan subjek pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang disampaikan oleh subjek pajak, kepala daerah menerbitkan SPPT. SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB Perdesaan Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.

2) Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

Menurut Siahaan (2016:566) Bupati/walikota dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) apabila PBB-P2 dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar dan wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan atau denda. Sanksi administratif berupa bunga dikenakan kepada wajib pajak yang tidak atau kurang membayar pajak yang terutang. Dengan demikian, pajak terutang dalam SPPT atau SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dan ditagih melalui STPD. STPD harus dilunasi dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

c. Penagihan PBB-P2

Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SPPT atau SKPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak. Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran pajak, dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterimanya, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.

Apabila jumlah pajak terutang yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis akan ditaguh dengan Surat Paksa. Tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan, pelelangan, pencegahan, dan penyanderaan apabila wajib pajak tetap tidak mau melunasi utang pajaknya. Apabila terhadap wajib pajak dilakukan penyitaan dan pelelangan barang milik wajib pajak yang disita maka kepada pemerintah kabupaten/kota diberi hak mendahulu untuk tagihan pajak atau barang-barang milik wajib pajak atau penanggung pajak. Ketentuan hak mendahulu meliputi pokok pajak, sanksi administratif berupa kenaikan, bunga, denda, dan biaya penagihan pajak. Adanya ketentuan tentang hak mendahulu ini daerah apabila pada saat yang bersamaan wajib pajak memiliki utang pajak

dan juga utang/kewajiban perdata kepada kreditur lainnya, sementara wajib pajak tidak mampu melunasi semua utangnya sehingga dinyatakan pailit.

4. Konsep Penghapusan Sanksi Administrasi

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut kedaulatan rakyat. Kansil (1989:39), menyatakan bahwa “Barang siapa yang dengan sengaja melanggar sesuatu kaedah hukum akan dikenai sanksi (sebagai akibat pelanggaran kaedah hukum) yang berupa *hukuman*”.

a. Sanksi Pajak

Penerapan sanksi dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang dengan sengaja/tidak sengaja telah lalai dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya. Adanya pemberian sanksi tersebut diharapkan wajib pajak sadar dan patuh dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam hal membayar pajak di masa yang akan datang. Adanya sanksi terhadap wajib pajak memungkinkan wajib pajak akan berfikir ulang jika akan melakukan tindakan kecurangan atau dengan sengaja lalai dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Sanksi administrasi sebagai instrumen hukum dapat digunakan sebagai alat oleh aparat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pajak daerah untuk memaksa wajib pajak untuk mentaati ketentuan-ketentuan perundang-undangan perpajakan guna menunjang sistem pemungutan pajak yang efektif dan efisien. Mardiasmo (2011:59) menyatakan :

“Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.”

Mardiasmo (2011:59) menyebutkan bahwa dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

1) Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan ada 3 (tiga) macam sanksi administrasi, yaitu berupa denda, bunga, dan kenaikan. Dasar hukum yang menjadi landasan dari lahirnya sanksi administrasi perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 5 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

2) Sanksi Pidana

Merupakan siksaan atau penderitaan. Sanksi pidana merupakan alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

b. Pengampunan pajak

Pengampunan pajak diharapkan menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum atau kurang dibayar, di samping meningkatkan kepatuhan membayar pajak karena makin efektifnya pengawasan karena semakin akuratnya informasi mengenai daftar kekayaan wajib pajak. Rahayu (2010:327) menyatakan bahwa *tax amnesties* merupakan

“Kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu

yang bertujuan untuk membantu memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak patuh. Sehingga diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak di masa mendatang”.

Amnesty berasal dari bahasa Yunani “*amnestia*” yang berarti lupa akan suatu hal atau kejadian yang telah lalu. Bila dikaitkan dengan kebijakan *tax amnesty*, maka pemerintah memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan perbaikan atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang di masa lalu dengan membayar seluruh kekurangan pokok pajak tetapi dibebaskan dari pengenaan sanksi bunga, denda ataupun sanksi pidana fiskal (*tax crime*).

Rahayu (2013:329) membagi jenis amnesti pajak sebagai berikut :

- 1) Amnesti yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak, termasuk bunga dan dendanya, dan hanya mengampuni sanksi pidana perpajakannya. Tujuannya adalah untuk memungut pajak tahun-tahun sebelumnya, sekaligus menambah jumlah wajib pajak terdaftar.
- 2) Amnesti yang mewajibkan pembayaran pokok pajak masa lalu yang terutang berikut bunganya, namun mengampuni sanksi denda dan sanksi pidana pajaknya.
- 3) Amnesti yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak yang lama, namun mengampuni sanksi bunga, denda, dan sanksi pidana pajaknya.
- 4) Bentuk amnesti yang paling longgar karena mengampuni pokok pajak di masa lalu, termasuk sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidananya. Tujuannya adalah untuk menambah jumlah wajib pajak terdaftar, agar ke depan dan seterusnya mulai membayar pajak.

c. Penghapusan Sanksi Denda Pajak

1) *Sunset Policy*

Sunset policy merupakan suatu kebijakan publik dari pemerintah yang diharapkan dapat diterima secara baik oleh masyarakat sebagai wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Raksasatya dalam Nurkhafidloh (2017) menyatakan bahwa kebijakan adalah

“Suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan, oleh karena itu suatu kebijakan memuat 3 (tiga) elemen, yaitu : identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai, taktik atau strategi untuk mencapai tujuan yang

diinginkan dan penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi”.

Sunset Policy menurut Waluyo dalam Nurkhafidloh (2017)

berangkat dari konsep pengampunan pajak (*tax amnesty*). Suryarini dan Anwar (2010) menjelaskan :

“*Sunset policy* merupakan *tax amnesty* dengan tingkat yang paling rendah. *Tax amnesty* adalah peluang dalam periode tertentu bagi wajib pajak untuk membetulkan laporan pajaknya dan membayar dalam jumlah tertentu demi mendapatkan pengampunan berkaitan dengan kewajiban pajaknya (termasuk bunga dan sanksi administrasi) di masa lalu atau masa tersebut dengan jaminan bebas dari tuntutan pidana. *Sunset policy* hanya memberikan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, sedangkan pokok utang pajaknya tetap harus dilunasi. Pidana fiskal juga gugur jika wajib pajak melunasi pokok utang pajak yang belum dilaporkan atau belum dibayarkan untuk tahun-tahun pajak yang mendapat fasilitas *sunset policy* dan pemberian *sunset policy* ini jangka waktunya dibatasi”.

Rahayu (2013:333) menyatakan bahwa *sunset policy* adalah suatu kebijakan *soft amnesty*. Kebijakan *soft amnesty* diatur dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan. Kemudian diatur pula dalam Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.03/2008 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Pelunasan Kekurangan Pembayaran Pajak sehubungan dengan Penyampaian SPT Tahunan untuk tahun pajak sebelum tahun 2007.

- 2) Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2)

Pelaksanaan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 14 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Dan Aset Sitaan Nomor : BA-04/ Wajib Pajak J.12/KP.04/2013 tanggal 31 Januari 2013 serta untuk percepatan penyelesaian piutang pajak PBB-P2 di Kota Batu, maka pemerintah kota berupaya untuk memberi kesempatan kepada wajib pajak dengan cara tertentu untuk melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu tertentu tanpa dikenakan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran. Maka, dalam hal ini Pemerintah Kota Batu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penghapusan Sanksi Administratif atas keterlambatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan masa pajak sampai dengan tahun 2015.

a) Ruang Lingkup Kebijakan Penghapusan Sanksi

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam PER-Walikota Batu Nomor 47 Tahun 2016 yakni tanggungan atau pembebanan di luar pokok pajak terutang berupa denda sebesar 2% (dua persen) tiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Maksud penghapusan sanksi administratif adalah untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak melakukan pembayaran piutang tanpa dikenakan sanksi administratif yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

Penghapusan sanksi administrasi berdasarkan Peraturan Walikota Batu Nomor 47 Tahun 2016 tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan upaya penerimaan daerah dari sektor PBB-P2, dan untuk mengoptimalkan upaya penyelesaian piutang PBB-P2.

Adapun, sasaran kebijakan penghapusan sanksi administratif ini adalah wajib pajak yang memiliki piutang PBB-P2 untuk masa pajak sampai dengan 2015. Kebijakan Perwali ini ditetapkan tanggal 5 Oktober sampai dengan 31 Desember 2016.

b) Teknis Pelaksanaan

Teknis pelaksanaan untuk mengajukan permohonan penghapusan sanksi pajak berupa denda administratif yang dimaksud dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 47 Tahun 2016 secara prosedural, adalah sebagai berikut :

- (1) Wajib pajak mengajukan permohonan penghapusan sanksi administratif melalui loket pelayanan pada kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada butir pertama melampirkan :
 - (a) Formulir permohonan;
 - (b) SPPT PBB-P2; dan
 - (c) Foto *copy* kartu identitas (KTP).
- (3) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (2) poin (a) tercantum dalam lampiran I PER-Walikota Batu Nomor 47 Tahun 2016 dan disediakan pula pada loket pelayanan pada kantor BKD Kota Batu.
- (4) Petugas pelayanan melaksanakan verifikasi pelayanan.
- (5) Kepala BKD Kota Batu memberikan persetujuan atas permohonan wajib pajak yang ditetapkan dengan keputusan kepala BKD Kota Batu sebagaimana tercantum dalam lampiran II Per-Walikota Batu Nomor 47 Tahun 2016.
- (6) Petugas Bank Jawa Timur (Bank Jatim) menerima pembayaran dari wajib pajak dan mencetak tanda bukti setoran.
- (7) Wajib pajak menerima tanda bukti setoran pembayaran PBB-P2.

5. Konsep Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Mardiasmo dalam anggraini, dkk (2016) menyatakan bahwa “Efektivitas adalah hubungan antara tujuan yang hendak dicapai dengan hasil yang telah dilakukan”. Suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif jika pekerjaan tersebut

dapat mencapai target atau bahkan melebihi target yang ditetapkan. Indikator efektivitas menggambarkan sejauh mana jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Cameron dalam Almilia dan Lindrianasari (2009:135) menyatakan bahwa “Efektivitas dapat dicapai apabila terbebas dari berbagai karakteristik ketidakefektivan, antara lain adanya kelemahan atau kesalahan”.

b. Ukuran Efektivitas

Marantika (2014) mengemukakan bahwa tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Dikatakan tidak efektif apabila hasil atau usaha yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan atau sasaran yang diharapkan tidak tercapai, dan dikatakan efektif apabila usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan menyebabkan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya tercapai. Budiani (2007) menyatakan bahwa ukuran efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program.

1) Ketepatan sasaran program

Budiani (2007) menyatakan bahwa “Ketepatan sasaran program adalah sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya”. Apabila dikaitkan dengan program *sunset policy* PBB-P2, maka ketepatan sasaran dapat dilihat dengan

membandingkan jumlah SPPT PBB-P2 yang menunggak dengan jumlah SPPT yang terealisasi dihapuskan (Marantika, 2014).

2) Sosialisasi program

Budiani (2007) menyatakan “Sosialisasi program berkenaan dengan tersampainya informasi kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya”. Abdulsyani (2012:58) menyatakan bahwa sosialisasi dapat terjadi secara langsung dan tidak langsung. Sosialisasi langsung berarti penyampaian informasi dilakukan secara *face to face* antara komunikator dan komunikan tanpa menggunakan media atau perantara komunikasi, sedangkan sosialisasi tidak langsung berarti upaya penyampaian informasi dilakukan melalui perantara/alat komunikasi. Adapun perantara/alat komunikasi menurut Putra dan Rahayu (2016) yakni melalui media elektronik dan media cetak. Apabila dikaitkan dengan program *sunset policy* PBB-P2, maka sosialisasi program dapat dilihat dengan tingkat sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat di Kota Batu, terutama masyarakat yang menunggak PBB-P2.

3) Tujuan program

Budiani (2007) menyatakan “Tujuan program adalah sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya”. Tujuan dari program *sunset policy* adalah untuk menghapuskan piutang PBB-P2, maka ketepatan tujuan

dapat dilihat dengan membandingkan nilai piutang PBB-P2 tertunggak dengan nilai piutang PBB-P2 yang terealisasi (Marantika, 2014).

4) Pemantauan program

Abdulsyani (2012:63) menyatakan pemantauan merupakan upaya pengawasan. Winardi dalam Nazarudin (2014) salah satu bentuk pengawasan dapat dilakukan dengan upaya preventif maupun represif. Upaya preventif menurut Syarbaini dan Rusdiyanta (2013:93) dilakukan sebelum adanya pelanggaran, misal melalui sosialisasi seperti penyuluhan, mengajak dan membimbing anggota masyarakat, sedangkan pengendalian melalui represif dilakukan setelah terjadi pelanggaran atau mengancam sanksi.

Budiani (2007) menyatakan “Pemantau program berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan setelah adanya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program”. Apabila dikaitkan dengan program *sunset policy* PBB-P2, maka pemantauan program dilihat secara represif. Upaya represif dilihat dengan adanya sanksi yang mungkin diberikan bagi wajib pajak PBB-P2 yang masih belum melunasi piutang PBB-P2 meskipun ada insentif dari pemerintah daerah berupa *sunset policy*.

6. Analisis SWOT

a. Definisi Analisis SWOT

Halim dan Kusufi (2014:91) menyatakan bahwa “Analisis SWOT merupakan salah satu alat dalam manajemen strategis untuk menentukan

kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*), dan ancaman (*threat*)”.

1) Kekuatan (*strength*)

Amirullah (2015:59) menyatakan bahwa

“Kekuatan merupakan sumber atau kemampuan yang dikuasai atau yang tersedia bagi perusahaan dan memberikan keuntungan dibandingkan dengan pesaingnya dalam melayani pasar pelanggan. Umumnya, daerah kekuatan berkaitan dengan keunggulan dari para pegawai atau berdasarkan sumber daya”.

2) Kelemahan (*weakness*)

Menurut Lembana, dkk (2013:41) “Kelemahan merupakan keterbatasan atau kekurangan dalam salah satu sumber atau kemampuan (*capability*) perusahaan dibandingkan dengan para pesaingnya”.

3) Peluang (*opportunity*)

Amirullah (2015:31) menyatakan bahwa “Peluang adalah faktor-faktor lingkungan luar positif, yang dapat dan mampu mengarahkan kegiatan organisasi kearahnya”.

4) Ancaman (*threat*)

Amirullah (2015:31) menyatakan bahwa “Ancaman adalah faktor-faktor lingkungan luar yang menghambat pergerakan organisasi”.

Menurut Assauri (2016:71) analisis SWOT dilakukan dengan mengintegrasikan antara lingkungan eksternal dan lingkungan internal perusahaan. Amirullah (2015:23) menyatakan bahwa :

“Dalam melakukan analisis lingkungan eksternal, perusahaan menggali dan mengidentifikasi semua peluang (*opportunity*) yang berkembang dan menjadi tren pada saat itu serta mengidentifikasi ancaman (*threat*) dari para pesaing dan calon pesaing serta faktor eksternal lainnya. Sedangkan analisis lingkungan internal lebih memfokuskan pada identifikasi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) dari perusahaan”.

Berdasarkan analisis SWOT, selanjutnya dapat dipertimbangkan dengan baik faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat yang kemudian dapat ditentukan strategi terbaik untuk mencapai tujuan organisasi.

b. Analisis Lingkungan Organisasi

1) Lingkungan Eksternal Organisasi

Terdapat sejumlah faktor eksternal yang mempengaruhi pilihan perusahaan mengenai arah dan tindakan, yang pada akhirnya juga mempengaruhi struktur organisasi dan proses internalnya. Menurut Amirullah (2015:24) salah satu komponen eksternal adalah lingkungan umum (*general environment*). Lingkungan umum sebagai salah satu instrumen lingkungan eksternal terdiri dari segmen demografi, politik/hukum, sosial budaya, serta teknologi (Hitt, *et al* dalam Amirullah 2015:24). Uraian dari masing-masing segmen dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Implikasi segmen lingkungan umum

Segmen dan Elemen	Implikasi Segmen
Segmen Demografi	<ul style="list-style-type: none"> • Besarnya populasi • Struktur usia • Distribusi geografis • Komposisi etnis • Distribusi pendapatan
Segmen Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat inflasi • Tingkat suku bunga • Defisit surplus neraca perdagangan • Defisit atau surplus anggaran • Tingkat simpanan pribadi • Tingkat simpanan perusahaan • Produk Domestik Bruto (PDB)

Segmen dan Elemen	Implikasi Segmen
Segmen Politik/Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum anti-trus • Hukum perpajakan • Deregulasi • Hukum ketenagakerjaan
Segmen Sosial-Budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Wanita dalam angkatan kerja • Varisasi dalam angkatan kerja perilaku atas kualitas kerja • Pergeseran dalam preferensi kerja dan karir
Segmen Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> • Inovasi produk • Inovasi proses • Aplikasi pengetahuan • Teknologi komunikasi

Sumber :Hitt, *et al.*, dalam Amirullah (2015:25)

2) Lingkungan Internal Organisasi

Menurut Amirullah (2015:58) lingkungan internal merupakan “Faktor-faktor yang berada di dalam organisasi yang mencerminkan kekuatan-kekuatan atau kelemahan-kelemahan yang ada di dalam organisasi”. Faktor-faktor lingkungan internal diidentifikasi menurut Amirullah (2015:60), antara lain :

- a) Pemasaran
Elemen-elemen dari faktor pemasaran yang harus dianalisis meliputi jenis dan kualitas produk yang dijual, harga premi, saluran distribusi, promosi penjual.
- b) Keuangan
Para penyusun strategi perlu melakukan analisis manajemen keuangan perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan. Hal ini bertujuan untuk mengukur tingkat keunggulan atau kekuatan keuangan perusahaan
- c) Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia merupakan faktor yang terpenting karena manusialah yang akan membuat keputusan untuk semua fungsi organisasi. Dengan demikian agar perusahaan mampu memiliki dan mempertahankan karyawan yang berkualitas tinggi, maka harus dipertahankan elemen-elemen dari faktor sumber daya manusia seperti sistem kompensasi, efektivitas insentif yang digunakan untuk memotivasi kinerja karyawan, jam kerja, kesempatan pelatihan dan pengembangan karyawan.

- d) Operasional
Dalam bidang operasional hal-hal yang perlu dianalisis adalah bagaimana pelayanan perusahaan kepada konsumen atau pelanggan.
- e) Organisasi
Faktor yang perlu diperhatikan dalam bidang organisasi adalah mengenai struktur organisasi, citra dan *prestise* perusahaan, suasana organisasi, kultur atau budaya organisasi.

3) Analisis SWOT dalam Program *Sunset Policy* PBB-P2 di Kota Batu

Adapun unsur-unsur yang digunakan dalam analisis SWOT apabila dikaitkan dengan program *sunset policy* PBB-P2 di Kota Batu, yaitu :

a) Kekuatan (*strength*)

Analisis untuk mengetahui kekuatan atau keunggulan dari penerapan program *sunset policy* sebagai upaya penurunan nilai piutang PBB-P2.

b) Kelemahan (*weakness*)

Analisis untuk mengetahui kekurangan-kekurangan internal dalam penerapan program *sunset policy* PBB-P2.

c) Peluang (*opportunity*)

Analisis kesempatan atau peluang yang dapat memungkinkan peningkatan penerapan program *sunset policy* sebagai upaya penurunan nilai piutang PBB-P2.

d) Ancaman (*threat*)

Analisis kemungkinan yang dapat terjadi dan menghambat penerapan program *sunset policy* sebagai upaya penurunan nilai piutang PBB-P2.

Menurut Rangkuti dalam Safitri dan Nursasmita (2007) untuk melakukan analisis untuk mengidentifikasi kekuatan (*strength*) dan

peluang (*opportunity*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threat*) maka perlu dilakukan analisis terhadap lingkungan. Analisis lingkungan dilakukan dengan jalan menganalisis lingkungan eksternal maupun menganalisis lingkungan internal di Kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu. Adapun identifikasi lingkungan eksternal dan internal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Identifikasi lingkungan eksternal dan internal

Faktor Eksternal
a) Lokasi tempat tinggal wajib pajak b) Kerjasama pemerintah daerah dan pemerintah desa c) Kepatuhan wajib pajak d) Perkembangan teknologi
Faktor Internal
a) Regulasi pemerintah b) Sumber daya pendanaan c) Sumber daya manusia (1) Kualitas (2) Kuantitas d) Sumber daya fasilitas (1) Sarana (2) Prasarana e) <i>Standard Operasional Prosedure</i> (SOP)

Sumber : *Data diolah peneliti (2018)*

Penjelasan dari masing-masing indikator di atas apabila dihubungkan dengan *sunset policy* di Kota Batu adalah sebagai berikut.

a) Lokasi tempat tinggal wajib pajak

Lokasi tempat tinggal wajib pajak berkaitan dengan tempat domisili wajib pajak PBB-P2 sebagai penunggak pajak.

b) Kerjasama pemerintah daerah dan pemerintah desa

Nisa (2009) menyatakan bahwa upaya penyelesaian tunggakan PBB memerlukan kerjasama khusus dengan instansi lain. Kerjasama pemerintah daerah dan pemerintah desa berkaitan dengan program *sunset policy* meliputi koordinasi dan sosialisasi program *sunset policy*.

c) Kepatuhan wajib pajak PBB-P2

Menurut Fasmi dan Misra (2014) bentuk kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dapat dilihat dari :

- (1) Kepatuhan untuk mendaftarkan diri
- (2) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang
- (3) Kepatuhan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT)
- (4) Kepatuhan dalam membayar tunggakan pajak

Berkaitang dengan program *sunset policy* PBB-P2, maka tingkat kepatuhan dapat dilihat melalui :

- (1) Wajib pajak PBB-P2 yang masih memiliki tunggakan pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh fasilitas *sunset policy*
- (2) Membayar tunggakan PBB-P2nya

d) Perkembangan teknologi

Teknologi dinilai penting dalam suatu organisasi baik organisasi pemerintah maupun swasta. Teknologi diyakini mampu meningkatkan efektivitas dalam organisasi (Sutarman dalam Yohanes, dkk:2013). Menurut Amirullah (2015:30) perkembangan teknologi berkaitan dengan inovasi dan perubahan teknologi.

Yohanes, dkk (2013) menyatakan bahwa teknologi informasi terdiri dari *hardware* dan *software*. *Hardware* dapat berupa komputer, *laptop/notebook* dilengkapi dengan LAN, dan lain-lain. Sementara *software* adalah aplikasi-aplikasi dan sistem yang digunakan. Jumaili dalam Sawitri (2016) menyatakan bahwa efektivitas penggunaan teknologi informasi dalam suatu perusahaan dapat dilihat dari kemudahan pemakai dalam mengidentifikasi data, mengakses data dan menginterpretasikan data.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa dengan adanya teknologi dapat menunjang kinerja organisasi. Sebaliknya keterbatasan teknologi akan menghambat kinerja organisasi. Namun, tidak menutup kemungkinan dengan adanya teknologi yang memadai tanpa diimbangi dengan jumlah dan *skill* sumber daya manusia yang mumpuni teknologi tersebut akan tetap menunjang kinerja.

e) Regulasi Pemerintah

Adanya regulasi turut menjamin dan mengatur berbagai aktivitas pelaksanaan program. Regulasi menjamin bahwa setiap pelaksanaan program adalah legal dan sah di mata hukum. Regulasi sebagai pedoman pelaksanaan memberikan arahan dalam pelaksanaan program.

f) Sumber daya pendanaan

Misroji (2014) mengemukakan bahwa sumber daya pendanaan dilihat dengan adanya ketersediaan dana yang memadai dalam menjalankan kebijakan publik

g) Sumber daya manusia

Menurut Misroji (2014) sumber daya manusia diukur berdasarkan tingkat kualitas dan kuantitasnya, tingkat kuantitas diukur dengan ketersediaan jumlah sumber daya manusia yang bersangkutan, sedangkan tingkat kualitas dari kinerja pegawai menurut Sedarmayanti dalam Satriya, dkk (2013) ditingkatkan dengan adanya upaya manajemen aparatur melalui pelatihan secara *on the job* dan *off the job*. Manajemen *on the job* dilakukan melalui rotasi kerja, magang, bimbingan, demonstrasi, dan pemberian contoh, sedangkan manajemen *off the job* dilakukan melalui diklat dan pendidikan formal.

h) Sumber daya fasilitas

Menurut Misroji (2014) sumber daya fasilitas tercermin dengan adanya sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan program.

i) *Standard operational procedur* (SOP)

Misroji (2014) mengemukakan bahwa aspek terpenting dalam struktur birokrasi adalah struktur itu sendiri dan *standard operational procedur* (SOP). SOP merupakan pedoman dalam

bertindak agar pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan

Berdasarkan identifikasi kondisi eksternal dan internal, maka selanjutnya berdasarkan analisis SWOT akan dianalisis indikator-indikator yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Setelah analisis SWOT, kemudian dapat ditarik kesimpulan faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung program *sunset policy* PBB-P2 di Kota Batu. Faktor penghambat diidentifikasi dari kelemahan dan ancaman, sedangkan faktor pendukung diidentifikasi melalui kekuatan dan peluang.

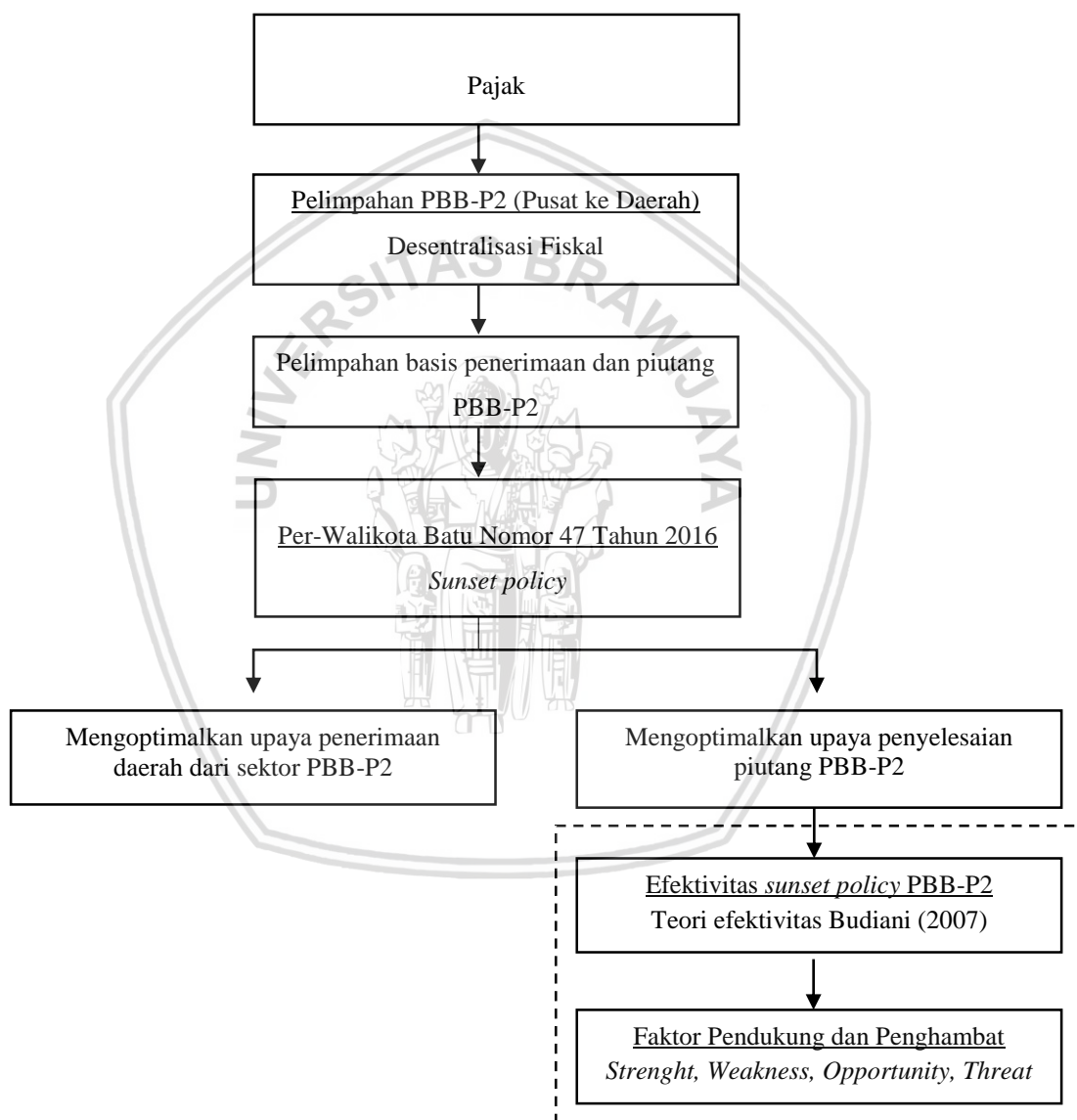
7. Kerangka Pemikiran

Skripsi ini meneliti tentang efektivitas program penghapusan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) atau *sunset policy* PBB-P2. *Sunset policy* ini tertuang dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 47 Tahun 2016. Kemudian penelitian ini juga mengidentifikasi faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program *sunset policy* PBB-P2 tersebut.

Efektivitas program *sunset policy* PBB-P2 di Kota Batu dianalisis menggunakan teori Budiani (2007), dimana indikator efektivitasnya meliputi ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program. Faktor pendukung dan penghambat dalam penelitian ini

dianalisis dengan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal dengan menggunakan indikator *strenght*, *weakness*, *opportunity*, dan *threat*.

Berdasarkan pemaparan di atas, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut.



Keterangan Gambar : Fokus Penelitian []

Gambar 1 : Kerangka pemikiran penelitian

Sumber : *Diolah Peneliti (2018)*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sugiyono (2016:15) menyatakan bahwa “Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci”. Nazir (2014:43) menyatakan bahwa deskriptif dalam penelitian berarti membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap fenomena yang diselidiki. Sugiyono (2016:23) menyatakan bahwa penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang kompleks dan memperoleh pemahaman makna.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program *sunset policy* dalam menurunkan nilai tunggakan PBB-P2 di Kota Batu, mengetahui faktor pendukung program *sunset policy* dalam menurunkan nilai tunggakan PBB-P2 di Kota Batu, dan untuk mengetahui faktor penghambat program *sunset policy* dalam menurunkan nilai tunggakan PBB-P2 di Kota Batu. Peneliti dalam hal ini berupaya untuk menelaah sebanyak mungkin tentang objek yang diteliti melalui pengumpulan data secara detail dan mendalam yang melibatkan berbagai sumber informasi.

B. Fokus Penelitian

1. Efektivitas program *sunset policy* PBB-P2

- a. Ketepatan sasaran program
 - 1) Jumlah SPPT PBB-P2 yang menunggak
 - 2) Realisasi jumlah SPPT PBB-P2 yang terselesaikan tunggakan pajaknya
- b. Sosialisasi program
 - 1) Sosialisasi langsung
 - 2) Sosialisasi tidak langsung
- c. Tujuan program
 - 1) Nilai PBB-P2 yang menunggak
 - 2) Realisasi nilai pembayaran tunggakan PBB-P2
- d. Pemantauan program
Represif melalui pemberian sanksi

2. Kondisi Eksternal

- a. Lokasi tempat tinggal wajib pajak
- b. Kerjasama pemerintah daerah dan pemerintah desa
- c. Kepatuhan wajib pajak PBB-P2 sebagai penungak pajak
- d. Perkembangan teknologi

3. Kondisi internal

- a. Regulasi pemerintah
- b. Sumber daya pendanaan
- c. Sumber daya manusia
- d. Sumber daya fasilitas

e. *Standard Operational Procedure* (SOP)

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau lokasi yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi guna memecahkan rumusan masalah dalam penelitian. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Kota Batu, Provinsi Jawa Timur. Kota Batu dipilih sebagai lokasi penelitian karena Kota Batu merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang menjalankan otonomi daerah dan memperoleh pelimpahan pembiayaan berdasarkan asas desentralisasi fiskal berupa PBB-P2. Sejak pendaerahan PBB-P2 dan beralihnya piutang PBB-P2 menjadikan permasalahan dikalangan pemerintah Kota Batu, karena nilai piutang tersebut membebani neraca daerah dari tahun ke tahun. Pemkot Kota Batu telah berupaya untuk menyelesaikan persoalan terkait piutang PBB-P2 melalui program *sunset policy* PBB-P2 melalui pemberian insentif pembayaran tunggakan PBB-P2 melalui penerbitan *sunset policy* PBB-P2 jilid 1. Di Kota Batu akan diterbitkan *sunset policy* PBB-P2 jilid 2, sehingga peneliti memilih Kota Batu sebagai lokasi penelitian untuk mengkaji efektivitas *sunset policy* PBB-P2 jilid 1 guna memberikan bahan masukan untuk *sunset policy* PBB-P2 jilid 2 di Kota Batu.

Situs penelitian adalah tempat sebenarnya peneliti dapat mengungkapkan keadaan objek yang diteliti. Situs penelitian dalam penelitian ini adalah Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu yang terletak di Jalan Panglima Sudirman, Nomor 507 Gedung B Lantai 1, Batu, Jawa Timur. BKD Kota Batu merupakan instansi yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Batu untuk menangani pengelolaan

pajak daerah terutama penyelesaian masalah terkait tunggakan PBB-P2 yang diupayakan melalui penerbitan program *sunset policy* PBB-P2.

D. Sumber Data

Menurut Sugiyono (2016:308) tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Apabila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Sumber Data Primer

Menurut Sugiyono (2016:308) “Sumber primer adalah sumber data yang *langsung memberikan* data kepada pengumpul data”. Jadi data primer adalah data yang dihimpun sendiri oleh peneliti berdasarkan objek yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan (1) Kepala Sub Bidang Penetapan dan Pengelolaan Data, (2) Staf Sub Bidang Penetapan dan Pengelolaan Data, (3) Kepala Bidang Penagihan, Pelaporan, dan Pengawasan.

Terhadap pihak narasumber dalam penelitian ini ditentukan dengan metode *snowball sampling*. Sugiyono (2016:300) menyatakan bahwa “*Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang awalnya jumlahnya sedikit lama-lama menjadi besar”. Sugiyono (2016:303) menyatakan bahwa berdasarkan teknik *snowball sampling*, peneliti akan memilih orang pertama sebagai sumber data. Kemudian, informan awal ini akan menyarankan peneliti untuk menuju kepada informan selanjutnya.

Menurut Spradley dikutip oleh Faisal dalam Sugiyono (2016:303) pemilihan informan sebaiknya yang menguasai dan memahami serta mereka yang terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti. Berdasarkan pemaparan tersebut, Ibu Wiyanti Lena Porwati, ST selaku Kepala Sub Bidang Penetapan dan Pengolahan Data dipilih sebagai orang pertama dalam sumber data primer karena informan tersebut mengenali keseluruhan medan secara luas. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling*, sehingga informan kedua dan ketiga dipilih melalui rekomendasi dari informan pertama. Berdasarkan rekomendasi Ibu Lena sebagai informan pertama, informan kedua dalam penelitian ini yaitu Ibu Farida Anisah, S.Sos, M.M selaku Kepala Bidang Penagihan, Pelaporan dan Pengawasan berdasarkan, sedangkan informan ke tiga yaitu Bapak Ali Fathur Rohman selaku Staf Bidang Pendataan bagian analis penilai.

2. Sumber Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2016:308-309) “Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen”. Data sekunder dalam penelitian ini digunakan sebagai penguat hasil data primer. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi renstra BKD Kota Batu Tahun 2017 s.d 2020, dokumen terkait jumlah tunggakan piutang PBB-P2 pasca pelimpahan dari KPP Pratama Batu, dokumen terkait jumlah tunggakan piutang PBB-P2 pasca pemutakhiran, dokumen terkait realisasi piutang dari program *sunset policy*, jumlah SPPT penunggak PBB-P2, jumlah SPPT PBB-P2 terbayar pada bulan Oktober s.d Desember 2016

E. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Esterberg (2002) dalam Sugiyono (2016:317) menyatakan bahwa “Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu”. Esterberg (2002) dalam Sugiyono (2016:319) mengemukakan bahwa teknik wawancara meliputi wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode semi terstruktur.

Wawancara semi terstruktur menurut Sugiyono (2016:320) di dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara semi terstruktur adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan bertanya langsung kepada informan untuk menggali dan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara, sehingga peneliti dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kebutuhan informasi yang diinginkan. Adapun informan pertama dalam penelitian ini yaitu Ibu Wiyanti Lena Porwati, ST selaku Kepala Sub Bidang Penetapan dan Pengolahan Data, informan kedua yaitu Ibu Farida Anisah, S.Sos, M.M selaku Kepala Bidang Penagihan, Pelaporan dan Pengawasan

berdasarkan, dan informan ke tiga yaitu Bapak Ali Fathur Rohman selaku Staf Bidang Pendataan bagian analis penilai.

2. Dokumentasi

Sugiyono (2016:329) menyatakan bahwa “Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang”. Melalui teknik dokumentasi ini peneliti mencoba mengumpulkan data dari kantor BKD Kota Batu yang didapat dari arsip atau sejenisnya yang berupa bahan tertulis, gambar, tabel, dan lain-lain yang kemudian atas data-data tersebut akan dilakukan analisis. Melalui teknik dokumentasi data yang diperoleh berupa renstra BKD Kota Batu Tahun 2017 s.d 2020, dokumen terkait jumlah tunggakan piutang PBB-P2 eks pelimpahan dari KPP Pratama Batu, dokumen terkait jumlah tunggakan piutang PBB-P2 pasca pemutakhiran, dokumen terkait realisasi piutang dari program *sunset policy*, jumlah SPPT penunggak PBB-P2, jumlah SPPT PBB-P2 terbayar pada bulan Oktober s.d Desember 2016.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu berupa :

1. Peneliti Sendiri

Sugiyono (2016:305) menyatakan bahwa “Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri”. Peneliti sebagai instrumen penelitian akan menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai

sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas semuanya.

2. Pedoman Wawancara

Instrumen yang digunakan dalam kegiatan wawancara adalah alat tulis dan alat rekam. Sugiyono (2016:319) menyatakan bahwa instrumen penelitian dalam kegiatan wawancara yakni berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Pedoman wawancara dalam penelitian ini berisikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan fokus penelitian yang meliputi efektivitas program *sunset policy*, faktor pendukung dan penghambat yang diperoleh melalui analisis kondisi internal dan eksternal. Pedoman wawancara dalam penelitian ini dapat dilihat pada lampiran 2.

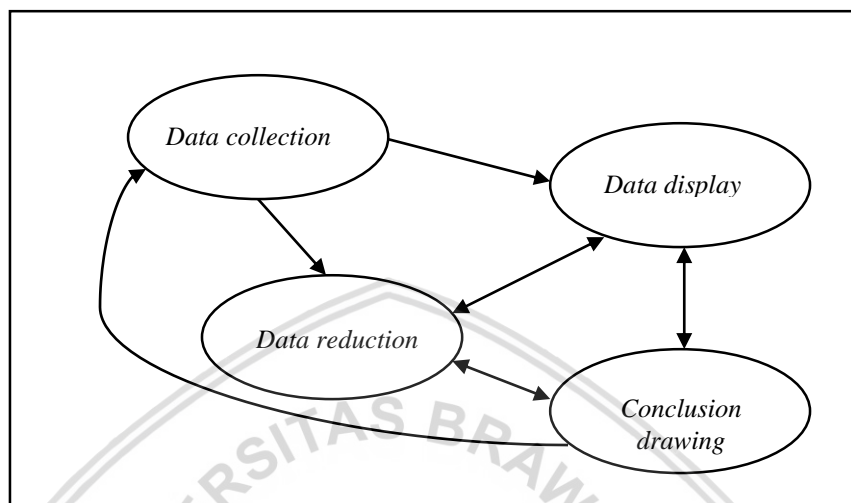
3. Pedoman Dokumentasi

Instrumen yang digunakan dalam kegiatan dokumentasi adalah berupa kamera yang nantinya akan direfleksikan dalam bentuk foto guna mendukung kegiatan penelitian. Bentuk dokumentasi dalam penelitian ini meliputi perda tentang Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota batu, dokumen terkait jumlah tunggakan piutang PBB-P2 eks pelimpahan dari KPP Pratama Batu, dokumen terkait jumlah tunggakan piutang PBB-P2 pasca pemutakhiran, jumlah SPPT penunggak PBB-P2 sebagai target sasaran program, jumlah SPPT PBB-P2 terbayar pada bulan Oktober s.d Desember 2016. Adapun dokumentasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada lampiran 4.

G. Metode Analisis Data

Sugiyono (2016:335) menyatakan bahwa “Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan

lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain”.



Gambar 2 : Komponen dalam analisi data

Sumber : Sugiyono (2016:338)

Sugiyono (2016:337) menyatakan bahwa “Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu”. Pada tahap ini, data yang dikumpulkan merupakan data hasil wawancara berupa transkrip wawancara dan data dokumentasi diperoleh dari kantor BKD Kota Batu. Data yang terkumpul merupakan data primer dan sekunder yang nantinya akan dianalisis oleh peneliti untuk selanjutnya akan digunakan pada tahap selanjutnya. Menurut Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2016:337) model interaktif dalam analisis data adalah sebagai berikut :

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Sugiyono (2016:338) menyatakan bahwa “Mereduksi data berarti merangkum, memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan

membuang hal yang tidak perlu”. Melalui reduksi data ini peneliti akan merangkum dan menyederhanakan data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Sugiyono (2016:341) menyatakan bahwa “Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk *flowchart* dan sejenisnya”, kemudian Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2016:341) mengungkapkan bahwa “Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Selanjutnya disarankan, dalam melakukan *display data*, selain dengan teks naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, *network*, dan *chart*”. Data yang telah direduksi oleh peneliti kemudian akan disajikan dalam bentuk teks dan sejenisnya yang selanjutnya diuraikan dalam bab IV.

3. *Conclusion Drawing* (Menarik Kesimpulan)

Tahap terakhir dalam menganalisis data adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang dipaparkan merupakan jawaban atas rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini. Data yang telah disajikan kemudian akan ditarik kesimpulan, kemudian dituangkan dalam bab V sebagai jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini.

H. Uji Keabsahan Data

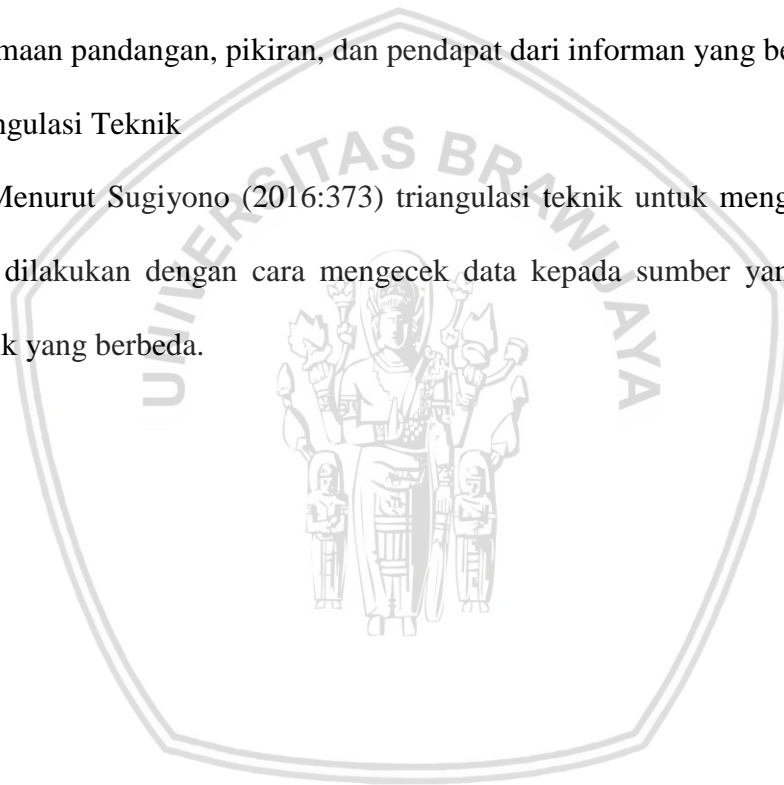
Sugiyono (2016:366) menyatakan bahwa “Menurut penelitian kualitatif, suatu realitas itu bersifat majemuk/ganda”. Uji keabsahan data merupakan salah satu teknik dalam penelitian untuk memperoleh data yang benar atau sahih sesuai dengan realitas yang ada. Dalam penelitian ini teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah :

1. Triangulasi Sumber

Menurut Sugiyono (2016:373) triangulasi sumber merupakan upaya untuk menguji kreadibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Pengecekan data dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara informan utama dengan informan lain. Kegiatan pembandingan tersebut akan menghasilkan suatu kesimpulan yang diambil kesamaan pandangan, pikiran, dan pendapat dari informan yang berbeda.

2. Triangulasi Teknik

Menurut Sugiyono (2016:373) triangulasi teknik untuk menguji kreadibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.



BAB IV

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Badan Keuangan Daerah Kota Batu

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu adalah instansi pemerintah di lingkungan pemerintahan Kota Batu yang merupakan unsur penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. BKD Kota Batu merupakan suatu organisasi pengganti Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Sejak tahun 2016 Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) berubah menjadi Badan Keuangan Daerah (BKD). Badan Keuangan Daerah (BKD) merupakan gabungan dari 4 (empat) dinas, yaitu Dinas Pendapatan, Dinas Keuangan, Dinas Aset Daerah dan UPTD.

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang keuangan daerah. Adapun fungsi Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu berdasarkan Peraturan Walikota Batu Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Batu adalah sebagai berikut.

1. pengelolaan urusan kesekretariatan Badan Keuangan Daerah
2. penyusunan kebijakan teknis keuangan daerah
3. pelaksanaan tugas dukungan teknis keuangan daerah

4. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis keuangan daerah
5. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang keuangan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

Terkait dengan fungsi Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu sebagai pelaksana pengelolaan dan pemungutan pajak daerah, berdasarkan renstra BKD Kota Batu sampai dengan saat ini terdapat 9 (Sembilan) jenis pajak daerah yang telah dikelola langsung oleh BKD Kota Batu, yaitu :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan umum
6. Pajak Parkir
7. Pajak Air Bawah Tanah
8. Pajak Bumi dan Bangunan
9. Bea Perolehan Hak atas Bumi dan Bangunan (BPHTB)

1. Bidang Kerja Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu

Instansi BKD Kota Batu memiliki 6 (enam) bidang kerja, dimana masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Tugas dari setiap bidang telah di atur dalam Peraturan Wali Kota Batu Nomor 91 Tahun 2016. Uraian dari masing-masing bidang adalah sebagai berikut :

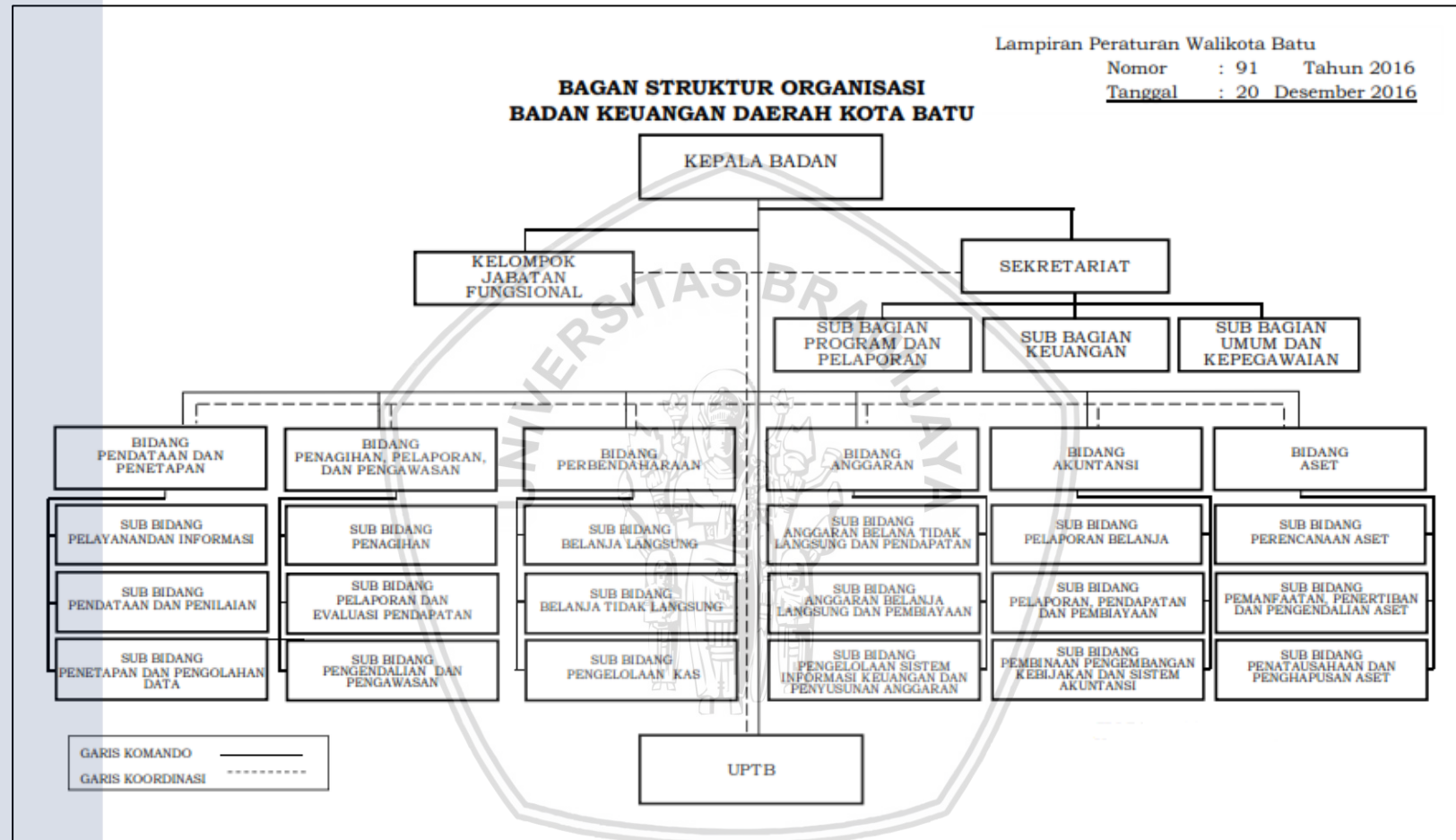
- a. Bidang Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan kegiatan perencanaan, penatausahaan, investasi,

pengamanan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, perubahan status hukum, serta pengendalian aset.

- b. Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman teknis, melaksanakan pengelolaan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian di bidang penerimaan dan pengeluaran kas serta TP-TGR.
- c. Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengkoordinasian, perumusan kebijakan serta penyusunan anggaran daerah.
- d. Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan petunjuk pelaksanaan akuntansi, melaksanakan prosedur akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas dan akuntansi selain kas, rekonsiliasi realisasi APBD, sebagai entitas akuntansi dan antitas pelaporan pemerintah daerah yang dapat disajikan sebagai informasi untuk bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- e. Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Pendataan dan Penetapan.
- f. Bidang Penagihan, Pelaporan dan Pengawasan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penagihan, pengendalian, pengawasan, pelaporan, dan evaluasi pajak daerah.

2. Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu

Adapun struktur organisasi Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu dapat dilihat pada gambar 2 sebagai berikut.



Gambar 3. Struktur organisasi BKD Kota Batu
 Sumber : Perwali Nomor 91 Tahun 2016

Pada gambar 2 di atas dapat dilihat struktur organisasi pada Kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu. Badan Keuangan Daerah Kota Batu dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. Kepala Badan berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan Badan maupun dengan lembaga teknis lainnya, dan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota.

Badan Keuangan Daerah Kota Batu terdiri dari:

- a. Kepala Badan,
- b. Sekretariat,
- c. Bidang Pendataan dan Penetapan,
- d. Bidang Penagihan, Pelaporan dan Pengawasan,
- e. Bidang Perbendaharaan,
- g. Bidang Anggaran,
- h. Bidang Akuntansi,
- i. Bidang Aset,
- j. UPT Badan, dan
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, koordinasi, dan sinkronisasi, serta

mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, dan keuangan. Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaiaan;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Program dan Pelaporan.

Bidang Pendataan dan Penetapan pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pendataan dan penetapan. Bidang Pendataan dan Penetapan membawahi :

- a. Sub Bidang Pelayanan dan Informasi;
- b. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian; dan
- c. Sub Bidang Penetapan dan Pengolahan Data.

Bidang Penagihan, Pelaporan dan Pengawasan pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Penagihan, Pelaporan dan Pengawasan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penagihan, pengendalian, pengawasan, pelaporan, dan evaluasi pajak daerah. Bidang Penagihan, Pelaporan dan Pengawasan membawahi:

- a. Sub Bidang Penagihan;
- b. Sub Bidang Pelaporan dan Evaluasi Pendapatan; dan

c. Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan.

Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengkoordinasian, perumusan kebijakan serta penyusunan anggaran daerah. Bidang Anggarn membawahi:

- a. Sub Bidang Anggaran Belanja tidak Langsung dan Pendapatan;
- b. Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung dan Pembiayaan; dan
- c. Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan dan Penyusunan Anggaran.

Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badang. Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman teknis, melaksanakan Pengelola, koordinasi, pembinaan dan pengendalian di bidang penerimaan dan pengeluaran kas serta TP-TGR. Bidang Perbendaharaan terdiri atas:

- a. Sub Bidang Belanja Langsung;
- b. Sub Bidang Belanja tidak Langsung; dan
- c. Sub Bidang Pengelolaan Kas.

Bidang Akuntansi pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang

Akuntansi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan petunjuk pelaksanaan akuntansi, melaksanakan prosedur akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas dan akuntansi selai kas, rekonsiliasi realisasi APBD, sebagai entitas akuntansi dan antitas pelaporan pemerintah daerah yang dapat disajikan sebagai informasi untuk bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Bidang Akuntansi membawahi:

- a. Sub Bidang Pelaporan Belanja;
- b. Sub Bidang Pelaporan, Pendapatan, dan Pembiayaan; dan
- c. Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kebijakan dan Sistem Akuntansi.

Bidang Aset pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang aset mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan kegiatan perencanaan, penatausahaan, investasi, pengamanan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, perubahan status hukum, serta pengendalian aset.

Bidang Aset membawahi

- a. Sub Bidang Perencanaan Aset;
- b. Sub Bidang Pemanfaatan, Penertiban, dan Pengendalian Aset; dan
- c. Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan Aset.

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan sesuai dengan keahlian

dan kebutuhan. Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku..

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

Penelitian ini membahas efektivitas program *sunset policy* PBB-P2 di Kota Batu. *Sunset policy* PBB-P2 merupakan salah satu upaya intensifikasi PBB-P2 di Kota Batu dengan cara penghapusan denda pajak. Berdasarkan hasil wawancara oleh informan 1 dengan kode DP_Ia.1A.1, informan 2 dengan kode DP_Ib.1A.1, serta informan 3 dengan kode DP_Ic.1A.1 dapat diketahui bahwa program *sunset policy* diterbitkan guna menurunkan nilai tunggakan PBB-P2 di Kota Batu. Program *sunset policy* PBB-P2 ini dilaksanakan pada bulan Oktober s.d Desember 2016. Berkaitan dengan pelaksanaan program, penting untuk diketahui pencapaian efektivitasnya, hal ini untuk mengukur sejauh mana program dapat dilaksanakan dengan efektif. Selanjutnya, dalam penelitian ini tingkat efektivitas program dilihat dari 4 (empat) indikator yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program (Budiani:2007). Pelaksanaan suatu program tentunya tidak luput juga dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik faktor eksternal maupun internal, oleh karena itu indikator fokus penelitian yang selanjutnya adalah faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan program yang berasal dari faktor eksternal dan internal. Adapun data fokus penelitian yang pertama dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Efektivitas pelaksanaan program *sunset policy* dalam menurunkan tunggakan PBB-P2 yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu

Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk dijadikan sebagai tolak ukur efektivitas pelaksanaan program *sunset policy* PBB-P2 di Kota Batu, antara lain :

a. Ketetapan sasaran program *sunset policy*

Penerapan program *sunset policy* PBB-P2 oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu tidak terlepas dari sasaran yang ingin dicapai oleh instansi tersebut. Ketetapan sasaran meliputi siapa saja yang menjadi sasaran dari program *sunset policy* PBB-P2 tersebut. Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan 1 dengan kode DP_Ia.1A.2, informan 2 dengan kode DP_Ib.1A.2, dan informan 3 dengan kode DP_Ic.1A.2 sasaran dari program *sunset policy* PBB-P2 adalah wajib pajak yang masih memiliki tunggakan PBB-P2 mulai dari adanya pengalihan dari KPP sampai dengan tahun 2015. Berdasarkan data sekunder yaitu Pasal 4 Per Walikota Batu Nomor 47 Tahun 2016 yang menjadi sasaran dari program *sunset policy* PBB-P2 yakni “sasaran penghapusan sanksi administratif adalah wajib pajak yang memiliki piutang PBB-P2 masa pajak sampai dengan 2015”.

Berdasarkan data sekunder yang diperoleh peneliti jumlah target sasaran dari program *sunset policy* adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Target penghapusan *sunset policy*

KETERANGAN	JUMLAH (Rp)	SPPT
Eks pemutakhiran (pelimpahan dari KPP)	3,561,330,849	73,888
2013	1,155,421,729	29,806
2014	3,763,347,202	35,573
2015	3,621,363,563	37,448
TOTAL	12,101,463,343	176,715

Sumber : Data diolah peneliti (2018)

Berdasarkan data sekunder yang diperoleh peneliti, jumlah pembayaran tunggakan PBB-P2 pada saat diterapkannya program *sunset policy* pada bulan Oktober, November, dan Desember 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Realisasi pelunasan PBB-P2 bulan Oktober s.d Desember 2016

BULAN	JUMLAH (Rp)	SPPT
Oktober 2016	916,225,104	5,795
November 2016	589,138,451	2,824
Desember 2016	516,648,894	2,310
TOTAL	2,022,012,449	10,929

Sumber : *Data diolah peneliti (2018)*

Berdasarkan tabel 5 dan tabel 6 dapat diketahui bahwa antara target dari program *sunset policy* PBB-P2 masih belum tercapai. Tabel di atas menunjukkan bahwa target dari program *sunset policy* PBB-P2 adalah 176,715 SPPT. Pada saat pelaksanaan program *sunset policy* PBB-P2 terdapat pelunasan tunggakan dari 10,929 SPPT, namun berdasarkan pernyataan informan 1 dengan kode DP_Ia.1A.3 dari jumlah 10,929 SPPT tersebut tidak semuanya subjek dari *sunset policy* PBB-P2, beberapa diantaranya termasuk wajib pajak yang melakukan pelunasan tunggakan pajak 2016.

b. Sosialisasi program *sunset policy* PBB-P2

Pada pelaksanaan suatu program atau kegiatan publik keberadaan sosialisasi sangatlah penting. Hal ini mengingat target atau sasaran kegiatan publik adalah khayalak umum yang sebarannya luas, sehingga proses sosialisasi harus memiliki strategi yang baik agar program yang dijalankan dapat dipahami oleh kelompok sasaran. Sama halnya dengan program *sunset policy* PBB-P2 di Kota Batu, perlu adanya sosialisasi kepada

masyarakat luas khususnya sasaran program *sunset policy* PBB-P2 tersebut. Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan 1 dengan kode DP_Ia.1B.1, informan 2 dengan kode DP_Ib.1B.1, serta informan 3 dengan kode DP_Ic.1B.1 bahwa sosialisasi program *sunset policy* PBB-P2 dilakukan secara langsung dan tidak langsung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi langsung dilakukan dengan cara bekerjasama dengan pihak aparaturnya desa di Kota Batu. Selain itu, sosialisasi langsung juga dilakukan dengan cara bekerjasama dengan kader hukum Pemerintah Kota Batu serta tokoh masyarakat seperti RT/RW. Adapun sosialisasi tidak langsung dilakukan dengan cara pemasangan spanduk dan penyebaran *flyer* (selebaran) terkait pelaksanaan program *sunset policy* PBB-P2. Berdasarkan data sekunder yang diperoleh peneliti sosialisasi langsung juga dilakukan melalui media elektronik berupa *youtube*. Adapun hasil dokumentasi bentuk sosialisasi tidak langsung dapat dilihat pada lampiran 3.

c. Tujuan program *sunset policy*

Penentuan tujuan menjadi penting guna menetapkan arah dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Seperti halnya pada pelaksanaan program *sunset policy* PBB-P2 di Kota Batu ini sendiri, dimana perumusan tujuan ini juga perlu dilakukan. Berdasarkan data primer yakni transkrip wawancara terhadap informan 1 dengan kode DP_Ia.1C.1, informan 2 dengan kode DP_Ib.1C.1, dan informan 3 dengan kode DP_Ic.1C.1 dapat diketahui bahwa tujuan diterapkannya program *sunset policy* PBB-P2 yakni untuk

menghapuskan nilai tunggakan PBB-P2 di Kota Batu serta memberikan kemudahan kepada WP PBB-P2 dalam melunasi tunggakan pajaknya. Berdasarkan data sekunder yakni Peraturan Walikota Batu Nomor 47 Tahun 2016 tujuan dari program *sunset policy* dalam pasal 2 berbunyi “Maksud penghapusan sanksi administratif adalah untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak melakukan pembayaran piutang tanpa dikenakan sanksi administratif yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu” serta dalam pasal pasal 3 ayat 2 yang berbunyi :

Penghapusan sanksi administratif bertujuan:

- a. Mengoptimalkan upaya penerimaan daerah dari sektor PBB-P2; dan
- b. Mengoptimalkan upaya penyelesaian piutang PBB-P2

Berdasarkan data sekunder yang diperoleh peneliti, nilai penghapusan yang menjadi target penghapusan denda dapat dilihat pada tabel 5 serta pembayaran tunggakan pada bulan Oktober s.d Desember 2016 dapat dilihat pada tabel 6. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi pembayaran tunggakan pada bulan dilaksanakannya program *sunset policy* PBB-P2 di Kota Batu terbilang kecil, dimana hanya ada pembayaran tunggakan sebesar Rp 2,022,012,449 dari target penghapusan sebesar Rp 12,101,463,343. Berdasarkan pemaparan informan 1 dengan kode DP_Ia.1A.3, pelunasan tunggakan sebesar Rp 2,022,012,449 tersebut bukan semuanya merupakan pelunasan tunggakan atas program *sunset policy* PBB-P2 di Kota Batu.

d. Pemantauan program *sunset policy*

Pemantauan sebagai salah satu bentuk pengawasan dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan maupun perkembangan dari suatu kebijakan atau program yang sedang dijalankan. Hal ini juga berlaku dalam penerapan program *sunset policy* PBB-P2 di Kota Batu itu sendiri, pemantaun diperlukan guna mengetahui sejauh mana perkembangan dari penerapan program *sunset policy* PBB-P2 dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemantauan yang dimaksud disini adalah ada tidaknya upaya represif setelah program dijalankan. Berdasarkan data primer yakni transkrip wawancara dengan informan 1 dengan kode DP_Ia.1D.1 dapat diketahui bahwa setelah program dilaksanakan tidak ada upaya represif sebagai bentuk pemantauan. Hal demikian juga di kemukakan oleh informan 2 dengan kode DP_Ib.1D.1 dan informan 3 dengan kode DP_Ic.1D.1 yang intinya menyatakana bahwa tidak ada upaya pemantauan setelah dilaksanakannya program. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa setelah program dilaksanakan tidak ada upaya represif seperti pemberian sanksi terhadap para penunggak pajak yang masih belum melunasi tunggakan pajaknya.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Program Sunset Policy PBB-P2 di Kota Batu

a. Faktor Pendukung

1) Faktor Eksternal

- a) Kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa

Kerjasama antar organisasi menjadi penting guna menunjang pelaksanaan program. Pelaksanaan program *sunset policy* PBB-P2 tidak hanya di tangan Pemerintah Daerah Kota Batu, tetapi juga bergantung pada beberapa pihak lainnya. Adanya kerjasama dengan beberapa pihak lain tersebut diharapkan akan menjadi faktor pendukung dalam menunjang pelaksanaan program *sunset policy*. Pihak lain yang dimaksud yang turut serta dalam menunjang pelaksanaan program yakni aparatur desa, tokoh masyarakat dan kadar hukum Kota Batu.

Berdasarkan data transkrip wawancara dengan informan 1 dengan kode DP_Ia.2A.5 dan informan 2 dengan kode DP_Ib.2A.5 dapat dimaknai bahwa pihak aparatur desa di Kota Batu turut menunjang pelaksanaan program *sunset policy* PBB-P2. Adapaun upaya aparatur desa dalam pelaksanaan program *sunset policy* dapat dilihat dengan adanya bantuan sosialisasi yang diberikan oleh aparatur desa. Kemudian, selain bantuan dalam hal sosialisasi program, berdasarkan transkrip wawancara dengan informan 3 dengan kode DP_Ic.2A.5 dapat dimaknai bahwa aparatur desa juga turut membantu dalam menghimpun masyarakat yang hendak melunasi tunggakan pajaknya.

Kerjasama dengan kadar hukum Kota Batu juga dijalin dengan baik oleh pelaksana program *sunset policy*. Berdasarkan transkrip wawancara dengan informan 3 dengan kode

DP_Ic.1B.1 dapat diketahui bahwa kerjasama dengan tokoh masyarakat dan kadar hukum Kota Batu dilakukan dalam hal sosialisasi. Para pelaksana program *sunset policy* PBB-P2 turun serta dengan kadar hukum Kota Batu untuk memberikan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat terkait pelaksanaan program *sunset policy* PBB-P2. Selain itu peran tokoh masyarakat juga dinilai penting untuk meneruskan sosialisasi kepada para masyarakat.

b) Perkembangan Teknologi

Teknologi memiliki peran penting dalam suatu organisasi guna menunjang kegiatan yang tengah dijalankan. Pada dekade terakhir ini kemajuan teknologi kian hari kian berkembang dengan pesat. Pelaksanaan program *sunset policy* PBB-P2 juga tidak luput dari peran serta teknologi di dalamnya. Berdasarkan data sekunder yakni bentuk dokumentasi foto lampiran 3 berikut menunjukkan bahwa pelaksanaan program *sunset policy* PBB-P2 di Kota Batu sudah dianggap memadai.

Berdasarkan data primer yang diperoleh peneliti, dukungan teknologi juga berperan dalam menunjang pelaksanaan program. Hal ini dapat dilihat berdasarkan transkrip wawancara terhadap informan 1 dengan kode DP_Ia.2A.7 yang dapat dimaknai bahwa pelaksanaan program *sunset policy* PBB-P2 di Kota Batu juga ditunjang dengan adanya *software* yaitu SISMIOP yang

berguna untuk pengelolaan data pajak daerah khususnya PBB-P2, hal ini dipertegas oleh informan 2 dengan kode DP_Ib.2A.7 yang menyatakan bahwa adanya sistem tersebut dapat mempermudah instansi terkait dalam melakukan pengelolaan data serta pelaporan data kepada Bank Jatim. Kemudian, dukungan teknologi dalam pelaksanaan program dikemukakan pula oleh informan 3 dengan kode DP_Ic.2A.7 yang menyatakan bahwa keberadaan tim IT yang turut menunjang keberadaan teknologi. Adapun data dokumentasi tentang SISMIOP dan perangkat teknologi lainnya dapat dilihat pada lampiran 3

2) Faktor Internal

a) Regulasi Pemerintah

Peraturan Walikota Batu Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penghapusan Sangsi Administratif atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Masa Pajak Sampai dengan Tahun 2015 tertanggal 7 Oktober 2016 merupakan aturan normatif yang mengatur tentang pelaksanaan program *sunset policy* PBB-P2 di Kota Batu. Adapun muatan perwali tersebut dapat dilihat pada lampiran 4.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwa faktor yang turut mendukung terlaksananya program *sunset policy* PBB-P2 di Kota Batu adalah regulasi yang mengaturnya, dengan

adanya regulasi tersebut memberikan arahan dan pedoman bagi para pelaksana program agar dalam pelaksanaan program tersebut dapat sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, dengan adanya regulasi tersebut pelaksanaan program menjadi sah di depan hukum.

b) *Skill* Pelaksana Program

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penunjang dalam pelaksanaan kegiatan di suatu organisasi. Tanpa adanya sumber daya manusia yang memadai, memungkinkan terjadinya kesenjangan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Sumber daya manusia mensyaratkan adanya kualitas dan kuantitas yang mampu mendukung kinerja dalam organisasi.

Kualitas seorang pegawai dalam suatu organisasi tercermin dari *skill* atau kecakapannya dalam menjalankan tugas-tugas yang diterima. Kecakapan seorang pegawai dalam menjalankan tugas terlihat ketika seorang pegawai mengetahui bagaimana dan apa yang harus dilakukannya. Hal ini berarti peran orang-orang dalam organisasi penting dalam memberikan bimbingan kepada pegawai guna meningkatkan *skill* pegawai. Bimbingan dalam satu pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk *on the job* maupun *off the job*.

Merujuk pada pengertian di atas, para pelaksana program *sunset policy* PBB-P2 di Kota Batu sudah dibekali pengetahuan

dalam pelaksanaan program. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data primer yakni transkrip wawancara terhadap informan 1 dengan kode DP_Ia.3A.7, informan 2 dengan kode DP_Ib.3A.7, dan informan 3 dengan kode DP_Ic.3A.7. Berdasarkan uraian informan 1, 2 dan 3 tersebut dapat dimaknai bahwa sebelum program *sunset policy* PBB-P2 dilaksanakan, terhadap para pelaksana akan diberikan pengarahan dan bimbingan. Hal ini berarti dalam meningkatkan *skill* para pelaksana program kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu melakukan bimbingan secara *on the job* kepada para pelaksana program. Hal tersebut dilakukan agar para pelaksana mengetahui bagaimana dan apa yang harus dilakukan ketika program berlangsung.

c) *Standard Operational Procedure* (SOP)

Guna menunjang terlaksanannya program sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, maka penting bagi suatu organisasi yang akan menjalankan suatu program untuk membuat suatu standar pelaksanaan. *Standard Operational Procedure* (SOP) merupakan sebuah panduan untuk menjalankan tugas dan fungsi setiap elemen atau unit. Hal ini berarti, SOP menjadi penting dalam suatu program, karena dengan adanya SOP suatu program dapat dijalankan dengan tertib dan terarah.

Berkaitan dengan hal tersebut, *sunset policy* PBB-P2 di Kota Batu juga turut didukung dengan adanya standar operasional. Hal ini ditujukan agar pelaksanaan program *sunset policy* PBB-P2 di Kota Batu berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Selain itu, dengan adanya standar operasional tersebut memudahkan bagi para pelaksana program dalam menjalankan setiap fungsinya. Berdasarkan hasil penelitian, program *sunset policy* PBB-P2 di Kota Batu telah didukung dengan adanya SOP, hal tersebut secara langsung dipaparkan oleh informan 3 yang menyatakan bahwa SOP dalam pelaksanaan program *sunset policy* PBB-P2 di Kota Batu sudah ada. Hal ini didukung pula dengan data sekunder, diperoleh peneliti, berikut adalah standar operasional dalam pelaksanaan program *sunset policy* PBB-P2 di Kota Batu.

1. Wajib pajak mengajukan permohonan penghapusan sanksi administratif melalui loket pelayanan pada dinas pendapatan kota batu.
2. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
 - a. Formulir permohonan;
 - b. SPPT PBB-P2; dan
 - c. Foto *copy* kartu identitas (KTP)
3. Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini dan disediakan pada loket pelayanan pada dinas pendapatan kota batu.
4. Petugas pelayanan melaksanakan verifikasi pelayanan.
5. Kepala dinas pendapatan memberikan persetujuan atas permohonan wajib pajak yang ditetapkan dengan keputusan kepala dinas pendapatan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.

6. Petugas bank jatim menerima pembayaran dari wajib pajak dan mencetak tanda bukti setoran.
7. Wajib pajak menerima tanda bukti setoran pembayaran PBB-P2.

b. Faktor Penghambat

Pelaksanaan program *sunset policy* PBB-P2 di Kota Batu tidak terlepas dari faktor eksternal dan internal yang mempengaruhinya, baik pengaruh yang bersifat positif maupun negatif. Berdasarkan identifikasi faktor eksternal dan internal yang dilakukan oleh peneliti, berikut adalah kondisi eksternal dan internal yang menghambat dalam pelaksanaan program *sunset policy* PBB-P2 di Kota Batu.

1) Faktor Eksternal

a) Lokasi tempat tinggal WP

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu 2016, luas Kota Batu $\pm 19.908,72$ Ha dengan populasi persebaran penduduk ± 200.485 jiwa. Hal demikian berarti tidak para penunggak pajak juga tersebar dalam lingkup tersebut. Berdasarkan Peraturan Walikota Batu Nomor 47 Tahun 2016 pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa “Wajib pajak mengajukan permohonan penghapusan sanksi administratif melalui loket pelayanan pada dinas pendapatan kota batu”. Hal tersebut mengindikasikan bahwa wajib pajak yang ingin memanfaatkan fasilitas penghapusan sanksi denda PBB-P2 atau *sunset policy* PBB-P2 harus datang langsung ke kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu. Hal ini menjadi salah satu kendala,

mengingat ada tempat tinggal warga yang berlokasi tidak dekat dengan kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu .

Berdasarkan transkrip wawancara dengan informan 3 dengan kode DP_Ic.2A.5 dapat dimaknai bahwa hanya satu desa saja yang mengajukan penghapusan melalui perangkat desanya, hal ini berarti mayoritas penunggak pajak secara individu datang ke kantor BKD untuk mengajukan penghapusan sanksi denda PBB-P2. Permasalahan yang timbul adalah pertama lokasi wajib pajak yang jauh dari kantor BKD membuat wajib pajak enggan datang ke kantor BKD Kota Batu guna memenuhi kewajiban perpajakannya, terutama pelunasan tunggakan pajaknya. Masalah yang ke dua adalah wajib pajak berada di luar kota, seperti yang dikemukakan oleh informan 1 dengan kode DP_Ia.2A.3, informan 2 dengan kode DP_Ib.2A.3, dan informan 3 dengan kode DP_Ic.2A.3 dapat dimaknai bahwa banyak pemilik objek pajak tidak dapat ditemui, seperti pemilik objek pajak vila, dan *homestay*. Wajib pajak sebagaimana dimaksud tersebut berkediaman di luar Kota Batu, namun objek pajaknya berlokasi di Kota Batu, sehingga tunggakan pajaknya masih belum bisa terlunasi karena keberadaan wajib pajak yang tidak dapat ditemui.

b) Kepatuhan WP PBB-P2 sebagai penungak pajak

Tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan program *sunset policy* PBB-P2 di Kota Batu. Berdasarkan transkrip wawancara terhadap informan 1 dengan kode DP_Ia.2A.1 dan informan 2 dengan kode DP_Ib.2A.1 dapat diketahui bahwa tingkat kesadaran wajib pajak PBB-P2 masih rendah begitupun dalam pelaksanaan program *sunset policy* PBB-P2 di Kota Batu. Masyarakat yang masih memiliki tunggakan PBB-P2 enggan dalam melapor dan membayarkan tunggakan pajaknya. Tingkat kepatuhan wajib pajak PBB-P2 juga dapat dilihat dari transkrip wawancara dengan informan 2 dengan kode DP_Ib.2A.6 dan informan 3 dengan kode DP_Ic.2A.6, berdasarkan pemaparan kedua informan tersebut dapat diketahui bahwa dari program *sunset policy* hanya sedikit warga yang memanfaatkannya.

Berdasarkan pemaparan dari informan 2 dengan kode DP_Ib.2A.2 upaya yang dilakukan oleh pihak BKD Kota Batu dalam mengatasi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu dengan memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini juga didukung dengan pernyataan dari informan 3 dengan kode DP_1c.1C.2 yang menyatakan bahwa upaya dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak yakni dengan memberikan edukasi dengan pemberian pemahaman kepada

masyarakat melalui sosialisasi. Hal tersebut dilakukan agar kedepannya masyarakat lebih sadar pajak, sehingga ketika masyarakat sadar pajak akan meminimalisir terjadinya tunggakan.

2) Faktor Internal

a) Sumber daya pendanaan

Pendanaan merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu program. Tersedianya dana dalam jumlah yang memadai untuk membiayai seluruh proses perencanaan menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam suatu program. Berdasarkan pemaparan informan 1 dengan kode DP_Ia.3A.3, informan 2 dengan kode DP_Ib.3A.3 dan informan 3 dengan kode DP_Ic.3A.3, program *sunset policy* PBB-P2 di Kota Batu tidak didukung dengan pendanaan yang cukup. Hal tersebut dikarenakan program tersebut tidak masuk dalam rancangan kegiatan tahunan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu pada saat itu, sehingga dalam APBD tidak dianggarkan dana untuk kegiatan tersebut.

b) Jumlah Personil

Sumber daya manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Tanpa sumber daya manusia tujuan tidak akan tercapai. Hal ini berlaku pula dalam pelaksanaan program *sunset policy* PBB-P2 di Kota Batu yang

tidak terlepas dari adanya para pelaksana dalam menunjang tercapainya tujuan. Sumber daya manusia dalam pelaksanaan program dapat dilihat dari 2 (dua) indikator, yakni kuantitas dan kualitas. Kuantitas SDM sebagai pelaksana program dilihat dari jumlah personil dalam pelaksanaan tersebut, indikator kuantitas mensyaratkan bahwa pelaksanaan program haruslah cukup atau mumpuni dalam menjalankan program terkait. Kemudian, indikator kualitas SDM dilihat dengan adanya kecakapan para pelaksana dalam menjalankan amanat atau perintah, sehingga semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut mengetahui bagaimana dan apa yang harus dilakukan ketika program dijalankan, hal ini telah dijelaskan pada pemaparan sebelumnya.

Berkaitan dengan tingkat kuantitas pelaksana program, berdasarkan data transkrip wawancara terhadap informan 1 dengan kode DP_Ia.3A.5 dapat dimaknai bahwa kuantitas pelaksana program cukup namun dengan menggandeng beberapa bidang yang ada. Kemudian berdasarkan pernyataan informan 2 dengan kode DP_Ib.3A.5 dan informan 3 dengan kode DP_Ic.3A.5 jumlah personil dalam pelaksanaan program *sunset policy* masih kurang apabila dibandingkan dengan begitu banyaknya jumlah penunggak pajak.

c) Sumber daya fasilitas

Fasilitas yang dimaksud di sini yakni berupa sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program *sunset policy* PBB-P2. Sarana dan prasarana merupakan salah satu komponen penting yang harus dipenuhi oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu untuk bisa mengoptimalkan pelaksanaan program *sunset policy* PBB-P2. Berdasarkan transkrip wawancara terhadap informan 1 dengan kode DP_Ia.3A.10, informan 2 dengan kode DP_Ib.3A.10, dan informan 3 dengan kode DP_Ic.3A.10 dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program masih minim terutama kendaraan dinas. Sehingga, selama sosialisasi program *sunset policy* PBB-P2 para aktor seringkali menggunakan kendaraan pribadi. Selain itu, berdasarkan transkrip wawancara oleh informan 1 dengan kode DP_Ia.3A.11 minimnya fasilitas juga terlihat dengan terbatasnya peralatan komunikasi dan komputer, sehingga seringkali para aktor terkait menggunakan *laptop* dan *handphone* milik pribadi. Berdasarkan pemaparan dari informan 1 dengan kode DP_Ia.3A.11, informan 2 dengan kode DP_Ib.3A.11, dan informan 3 dengan kode DP_Ic.3A.11, upaya yang dilakukan dalam mengatasi minimnya fasilitas yaitu dengan memanfaatkan fasilitas yang ada serta menggunakan beberapa fasilitas pribadi

dalam menunjang pelaksanaan program *sunset policy* PBB-P2 di Kota Batu.

C. Analisis Data Penelitian

1. Efektivitas pelaksanaan program *sunset policy* dalam menurunkan tunggakan PBB-P2 yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu

Efektivitas suatu program dapat tercapai dengan optimum apabila aktor yang terlibat dalam suatu program memiliki tingkat pemahaman yang kongruen dengan konsep normatif yang mengaturnya. Mardiasmo dalam anggraini, dkk (2016) menyatakan bahwa “efektivitas adalah hubungan antara tujuan yang hendak dicapai dengan hasil yang telah dilakukan”. Suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif jika pekerjaan tersebut dapat mencapai target atau bahkan melebihi target yang ditetapkan.

Selanjutnya, efektivitas suatu program penting untuk diketahui. Hal ini diperlukan karena dengan mengetahui tingkat efektivitasnya, maka para pelaksana program terkait bisa mempersiapkan langkah-langkah antisipatif untuk dapat mendorong pelaksanaan program *sunset policy* PBB-P2 di Kota Batu agar lebih baik lagi kedepannya. Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pedoman efektivitas program dari Budiani (2007). Adapun indikator yang digunakan yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program. Adapun analisis hasil penelitian adalah sebagai berikut.

a. Ketepatan Sasaran Program

Salah satu indikator untuk mengukur efektivitas program adalah ketepatan sasaran program. Dalam setiap program memiliki sasaran yang ingin dituju sehingga pelaksana program dapat memastikan apakah program tersebut tepat sasaran atau tidak. Selanjutnya mengenai pengertian ketepatan sasaran program menurut Budiani (2007) yaitu “Sejauh mana peserta program tepat pada sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya”.

Program *sunset policy* PBB-P2 merupakan salah satu upaya untuk menurunkan nilai tunggakan PBB-P2 dengan jalan memberikan insentif kepada para penunggak PBB-P2 yaitu berupa penghapusan sanksi denda PBB-P2. Dalam pelaksanaan program *sunset policy* PBB-P2 di Kota Batu, ada sasaran yang ingin dicapai, dengan kata lain siapa-siapa saja yang menjadi target dari program *sunset policy* tersebut dan sejauh mana sasaran tersebut tepat pada sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian tentang program *sunset policy* PBB-P2 di Kota Batu, yang menjadi sasaran program tersebut adalah wajib pajak PBB-P2 khususnya yang masih memiliki tunggakan pajak pada tahun sejak dialihkannya PBB-P2 ke daerah sampai dengan tahun 2015, hal ini didukung dengan pernyataan dari informan dan ketentuan normatif Peraturan Walikota Batu Nomor 47 Tahun 2016 Pasal 4. Bagi wajib pajak yang mengikuti program *sunset policy* wajib mengikuti prosedur

pengajuan *sunset policy* yang diatur dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 47 Tahun 2016 Pasal 6 yaitu :

- 1) Wajib pajak mengajukan permohonan penghapusan sanksi administratif melalui loket pelayanan pada dinas pendapatan kota batu
- 2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan :
 - a) Formulir permohonan;
 - b) SPPT PBB-P2; dan
 - c) Foto copy kartu identitas (KTP).
- 3) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini dan disediakan pada loket pelayanan pada dinas pendapatan kota batu.
- 4) Petugas pelayanan melaksanakan verifikasi pelayanan.
- 5) Kepala dinas pendapatan memberikan persetujuan atas permohonan wajib pajak yang ditetapkan dengan keputusan kepala dinas pendapatan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.
- 6) Petugas Bank Jatim menerima pembayaran dari wajib pajak dan mencetak tanda bukti setoran.
- 7) Wajib pajak menerima tanda bukti setoran pembayaran PBB-P2.

Berdasarkan data sekunder yang diperoleh peneliti pada tabel 5 dapat dilihat bahwa target sasaran program *sunset policy* PBB-P2 tersebut adalah 176,715 SPPT, artinya sebanyak 176,715 SPPT menunggak dan belum melakukan pembayaran pajaknya. Tunggakan tersebut terhitung sejak tahun pengalihan PBB-P2 ke daerah sampai dengan tahun 2015. Kemudian berdasarkan tabel 6 sejumlah 10,929 SPPT yang melunasi tunggakan pajak pada saat diberlakukannya program *sunset policy* PBB-P2 di Kota Batu tepatnya pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2016. Dari 10,929 SPPT tersebut tidak semuanya merupakan pembayaran atas tunggakan yang menjadi sasaran program *sunset policy* PBB-P2, namun di dalamnya juga memuat pembayaran tunggakan pada tahun 2016.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dilihat bahwa target sasaran dari program *sunset policy* PBB-P2 di Kota Batu masih belum tercapai. Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas program dilihat dari indikator ketepatan sasaran program menurut Budiani (2007) masih belum efektif.

b. Sosialisasi Program

Sosialisasi program merupakan bagian yang sangat penting dari pelaksanaan suatu program. Dengan melakukan sosialisasi, konsep dan maksud tujuan baru akan dipahami oleh khalayak umum, utamanya oleh *target group* (kelompok sasaran). Budiani (2007) menyatakan “sosialisasi program berkenaan dengan tersampainya informasi

kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya”. Abdulsyani (2012:58) menyatakan bahwa sosialisasi dapat terjadi secara langsung dan tidak langsung. Sosialisai langsung berarti penyampaian informasi dilakukan secara *face to face* antara komunikator dan komunikan tanpa menggunakan media atau perantara komunikasi, sedangkan sosialisasi tidak langsung berarti upaya penyampaian informasi dilakukan melalui perantara/alat komunikasi. Adapun perantara/alat komunikasi menurut Putra dan Rahayu (2016) yakni melalui media elektronik dan media cetak. Apabila dikaitkan dengan program *sunset policy* PBB-P2, maka sosialisasi program dapat dilihat dengan tingkat sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat di Kota Batu, terutama masyarakat yang menunggak PBB-P2.

Adapun dalam pelaksanaan program *sunset policy* PBB-P2 di Kota Batu, sosialisasi telah dilakukan oleh para pelaksana program, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Adapun bentuk sosialisasi langsung yang pertama adalah melalui pelibatan aparatur desa yaitu melalui perangkat desa/tokoh masyarakat di Kota Batu, upaya sosialisasi ini dilakukan dengan adanya kerjasama antara BKD Kota Batu dan aparatur desa di Kota Batu melalui penyampaian secara langsung terkait program *sunset policy* PBB-P2, sehingga kemudian aparatur desa di Kota Batu dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat melalui acara-acara yang ada di desa seperti tahlil atau acara lainnya. Adapun bentuk sosialisasi tidak langsung yang pertama adalah melalui media cetak

yaitu spanduk dan *leafet*, kemudian untuk sosialisasi tidak langsung lainnya berdasarkan data sekunder yang diperoleh peneliti, sosialisasi tidak langsung juga dilakukan melalui media sosial yaitu *youtube*.

Berdasarkan pemaparan di atas diketahui bahwa Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu telah mengupayakan adanya sosialisasi semaksimal mungkin. Hal ini terlihat dari adanya upaya-upaya yang dilakukan dalam sosialisasi langsung dan tidak langsung. Hal ini berarti indikator sosialisasi program guna mengukur tingkat efektivitas sudah berjalan secara efektif.

c. Tujuan Program

Adanya suatu tujuan adalah sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan tertentu agar suatu kegiatan berjalan sesuai dengan cita-cita yang diharapkan. Tujuan yang sudah disepakati seringkali dapat dijadikan indikator keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan. Hal ini dapat dipahami dari apa yang dikemukakan oleh Budiani (2007) terkait dengan tujuan program yaitu “Sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya”. Hal ini berarti bahwa tujuan merupakan indikator keberhasilan dari suatu kegiatan.

Adapun dalam pelaksanaan program *sunset policy* PBB-P2 di Kota Batu, tujuan program *sunset policy* secara normatif telah dijelaskan pada Peraturan Walikota Batu Nomor 47 Tahun 2016 pasal 3 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

Penghapusan sanksi administratif bertujuan:

- 1) Mengoptimalkan upaya penerimaan daerah dari sektor PBB-P2; dan
- 2) Mengoptimalkan upaya penyelesaian piutang PBB-P2

Adanya program penghapusan sanksi denda administrasi atau *sunset policy* tersebut, pemerintah Kota Batu melalui Badan Keungan Daerah (BKD) Kota Batu berharap dapat memberikan kemudahan para wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya khususnya penunggak PBB-P2 yang masih memiliki tunggakan pajak. Selain itu, pemerintah Kota Batu juga berharap program ini akan membantu dalam menurunkan nilai tunggakan yang nilainya cukup besar akibat adanya pelimpahan piutang dari KPP Pratama Batu pada 31 Januari 2013 silam.

Berdasarkan data yang telah disajikan pada tabel 5 dapat dilihat bahwa tujuan dari program *sunset policy* adalah untuk menghapuskan nilai tunggakan yang sebesar Rp 12,101,463,343, namun realisasinya dapat dilihat pada tabel 6 yang menunjukkan adanya pembayaran tunggakan sebesar Rp 2,022,012,449. Dari jumlah Rp 2,022,012,449 tersebut tidaklah semua merupakan pembayaran tunggakan dari program *sunset policy* PBB-P2, namun di dalamnya memuat pembayaran tunggakan PBB-P2 di bulan 2016. Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari program *sunset policy* PBB-P2 di Kota Batu tidak efektif jika mengacu pada teori Budiani (2007) yang menyatakan bahwa tujuan dan hasil haruslah sesuai.

d. Pemantauan Program

Fase pemantauan dalam suatu kegiatan atau program merupakan hal yang sangat penting. Pemantauan merupakan kegiatan pengontrolan terhadap pelaksanaan suatu kegiatan atau program yang akan, sedang maupun telah berjalan. Adapun pemantauan menurut Budiani (2007) yakni “Kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program”. Hal ini berarti pemantauan yang dimaksudkan oleh Budiani adalah ada tidaknya pemantauan setelah program telah selesai dijalankan.

Pernyataan di atas apabila dikaitkan dengan program *sunset policy* PBB-P2 di Kota Batu, maka pemantauan program dilihat secara represif. Upaya represif menurut Syarbaini dan Rusdiyanta (2013:93) dapat dilakukan setelah terjadi pelanggaran atau mengancam sanksi. Apabila dikaitkan dengan program *sunset policy* PBB-P2, pemantauan program secara represif dilihat dengan ada tidaknya sanksi yang diberikan bagi wajib pajak PBB-P2 yang masih belum melunasi tunggakan PBB-P2nya meskipun ada insentif dari pemerintah daerah berupa penghapusan sanksi denda (*sunset policy*).

Berdasarkan data yang telah disajikan sebelumnya terkait pengawasan program *sunset policy* PBB-P2 di Kota Batu belum sesuai dengan dengan pendapat Budiani (2007) yang menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program bisa dilihat dengan menggunakan indikator pemantauan program.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Program *Sunset Policy* PBB-P2 di Kota Batu

a. Faktor Pendukung

Pelaksanaan suatu kegiatan atau program tentunya tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya faktor-faktor yang menjadi pendukungnya. Adapun faktor-faktor yang mendukung dalam pelaksanaan program *sunset policy* PBB-P2 di Kota Batu adalah sebagai berikut.

1) Faktor Eksternal

Adanya kerjasama antara pemerintah daerah dengan aparatur desa Kota Batu turut menunjang dalam pelaksanaan program *sunset policy* PBB-P2 di Kota Batu. Adapun dukungan yang diberikan oleh aparatur desa di Kota Batu dalam pelaksanaan program *sunset policy* PBB-P2 ini berupa bantuan sosialisasi dengan penyebar luasan informasi terkait pelaksanaan program. Dengan luas Kota Batu $\pm 19.908,72$ Ha tidaklah mudah bagi kantor para aktor dalam melakukan sosialisasi ke seluruh pelosok Kota Batu, mengingat jumlah personil dalam pelaksanaan program tersebut pula yang dapat dibbilang terbatas.

Dukungan aparatur desa Kota Batu tidak hanya sebatas dalam hal sosialisasi, namun juga dalam hal pembayaran tunggakan PBB-P2. Berdasarkan data yang telah disajikan ada salah satu desa yaitu Desa Mojorejo yang kala itu menitipkan pembayaran tunggakan

PBB-P2 nya kepada perangkat desa, kemudian perangkat desa tersebut yang kemudian menyampaikan pembayaran tersebut ke kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu. Hal ini menunjukkan bahwa aparatur desa turut berkontribusi dalam pelaksanaan program *sunset policy* PBB-P2 di Kota Batu.

2) Faktor Internal

a) Regulasi Pemerintah

Regulasi merupakan suatu bentuk peraturan yang digunakan untuk mengendalikan suatu kegiatan. Regulasi sangat erat kaitannya dengan suatu peraturan dan sangat luas cakupan maknanya, oleh karena itu regulasi banyak digunakan dalam berbagai hal di masyarakat untuk kehidupan yang lebih teratur. Nurkhafidloh (2017) menyatakan bahwa regulasi merupakan salah satu sumber daya yang mendukung jalannya pelaksanaan program *sunset policy*. Tanpa bantuan regulasi atau peraturan resmi yang mengaturnya, maka program *sunset policy* mungkin tidak akan ada.

Program *sunset policy* PBB-P2 di Kota Batu didukung dengan adanya dasar hukum yang jelas yaitu Peraturan Walikota Batu Nomor 47 Tahun 2016 tentang *Sunset Policy* PBB-P2. Dengan adanya regulasi yang mengatur adanya program *sunset policy* PBB-P2 di Kota Batu tersebut, maka dalam pelaksanaan program akan memiliki arah dan pedoman yang jelas serta legal

di mata hukum. Sehingga program *sunset policy* PBB-P2 di Kota Batu dapat berjalan sebaik mungkin sesuai dengan peraturan yang ada untuk mencapai maksud dan tujuan yang telah ditetapkan.

b) Perkembangan teknologi

Dewasa ini perkembangan teknologi menjadi hal yang sangat penting guna menunjang kegiatan dalam suatu organisasi. Amirullah (2015:30) perkembangan teknologi berkaitan dengan inovasi dan perubahan teknologi. Selanjutnya Amirullah (2015:25) menyatakan bahwa segmen teknologi juga meliputi aplikasi pengetahuan. Yohanes, dkk (2013) menyatakan bahwa teknologi informasi terdiri dari *hardware* dan *software*. *Hardware* dapat berupa komputer, *laptop/notebook* dilengkapi dengan LAN, dan lain-lain. Sementara *software* adalah aplikasi-aplikasi dan sistem yang digunakan.

Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan teknologi dalam pelaksanaan program *sunset policy* PBB-P2 di Kota Batu cukup membantu dalam menunjang pelaksanaan program tersebut. Hal ini dapat dilihat dari hampir semua kegiatan menggunakan komputer, seperti penginputan dan penyimpanan data. Seperti yang dikemukakan sebelumnya dalam bab penyajian data, bahwa dengan banyaknya data PBB-P2 diiringi dengan kapasitas penyimpanan manusia yang terbatas, namun dengan

kemampuan komputer yang memiliki kapasitas penyimpanan yang besar mampu mengcover semua data-data tunggakan PBB-P2 tersebut. Selain memiliki kapasitas penyimpanan yang besar, komputer juga mampu menjamin data perusahaan tersusun secara rapi dan akurat dan tepat pada tempatnya, sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan mudah dan cepat.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian, *software* turut menunjang dalam pelaksanaan program tersebut. Software adalah program komputer yang menjadi jembatan antara pengguna dengan perangkat keras. *Software* penunjang pelaksanaan program *sunset policy* PBB-P2 di Kota Batu yaitu Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP). Pengertian Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) menurut Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-533/PJ/2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Pembentukan dan atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP), Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak adalah :

“Sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dengan bantuan komputer sejak dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan dan penilaian) pemberian identitas objek pajak (Nomor Objek Pajak), perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran (berupa SPPT, STTS, DHKP, dan sebagainya),

pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak, sampai dengan pelayanan kepada wajib pajak melalui Pelayanan Satu Tempat.”

Berdasarkan pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa SISMIOP merupakan sistem administrasi yang mengintegrasikan seluruh pelaksanaan kegiatan PBB P2 berbasis komputer, mulai dari pengumpulan data, pemberian identitas, pemrosesan, pemeliharaan, sampai pencetakan hasil keluaran.

c) *Skill* pelaksana program

Amirullah (2015:60) menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan faktor yang terpenting karena manusialah yang akan membuat keputusan untuk semua fungsi organisasi. Menurut Nurkhafidloh (2017) sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mendukung dalam pelaksanaan program *sunset policy*. Tanpa adanya sumber daya manusia maka tidak ada penggerak dalam suatu kegiatan atau program.

Sumber daya manusia dalam pelaksanaan suatu program tidak hanya dipandang dari jumlah dan juga dari segi kualitas Misroji (2014). Tingkat kualitas dari kinerja pegawai menurut Sedarmayanti dalam Satriya, dkk (2013) ditingkatkan dengan adanya upaya manajemen aparatur melalui pelatihan secara *on the job* maupun *off the job*. Manajemen *on the job* dilakukan melalui rotasi kerja, magang, bimbingan, demonstrasi, dan

pemberian contoh, sedangkan manajemen *off the job* dilakukan melalui diklat dan pendidikan formal.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa sumber daya manusia apabila dilihat dari sudut pandang kualitas sudah terpenuhi. Hal tersebut dapat dilihat dimana selama program berlangsung selalu ada *briefing* sebelum pelaksanaan program. Hal ini berarti terdapat manajemen *on the job* sebelum pelaksanaan program *sunset policy*. Hal tersebut dimaksudkan agar para aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program *sunset policy* PBB-P2 di Kota Batu mengetahui bagaimana dan apa yang akan dan harus dilakukan ketika pelaksanaan program tersebut.

d) *Standar Operational Procedure* (SOP)

Misroji (2014) mengemukakan bahwa aspek terpenting dalam struktur birokrasi adalah struktur itu sendiri dan *standard operational procedur* (SOP). SOP merupakan pedoman dalam bertindak agar pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Berkaitan dengan hal tersebut, program *sunset policy* PBB-P2 di Kota Batu juga didukung dengan adanya standar operasional dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam penetapan standar operasional dalam pelaksanaan program *sunset policy* PBB-P2

di Kota Batu ditujukan agar pelaksanaan program *sunset policy* PBB-P2 dilaksanakan dapat tertib dan terarah.

b. Faktor Penghambat

Keberadaan faktor penghambat sebenarnya tidak diinginkan dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau program. Adapun faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan program *sunset policy* PBB-P2 di Kota Batu adalah sebagai berikut.

1) Faktor Eksternal

a) Lokasi tempat tinggal WP

Lokasi tempat tinggal para penunggak PBB-P2 menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan program *sunset policy* PBB-P2 di Kota Batu, pertama karena jauhnya jarak kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu dengan rumah wajib pajak, sehingga wajib pajak harus menempuh jarak jauh supaya bisa memanfaatkan program *sunset policy* PBB-P2 tersebut, karena salah satu prosedur agar wajib pajak bisa memanfaatkan program ini harus datang langsung ke kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu terlebih dahulu untuk mengisi formulir yang sudah disediakan oleh petugas Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu. Kemudian, faktor penghambat kedua terkait lokasi tempat tinggal WP yaitu banyak WP rumah tinggal, seperti vila, hotel, dan *homestay* tidak berada ditempat saat

program berlangsung, sehingga kewajiban perpajakannya tidak dapat dipenuhi.

b) Kepatuhan WP PBB-P2

Kendala yang masih sering timbul adalah masih kurang tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Menurut Fasmi dan Misra (2014) bentuk kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dapat dilihat dari dari:

- (1) Kepatuhan untuk mendaftarkan diri
- (2) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang
- (3) Kepatuhan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT)
- (4) Kepatuhan dalam membayar tunggakan pajak

Berkaitan dengan program *sunset policy* PBB-P2, maka tingkat kepatuhan dapat dilihat melalui :

- 1) Wajib pajak PBB-P2 yang masih memiliki tunggakan pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh fasilitas *sunset policy*
- 2) Membayar tunggakan PBB-P2nya

Merujuk pada pengertian di atas dapat dikatakan bahwa keberhasilan program *sunset policy* ditentukan oleh semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak, artinya semakin banyak jumlah penerimaan pajak dan berarti program *sunset policy* semakin berhasil.

Berdasarkan data hasil penelitian dan apabila dikaitkan dengan pengertian di atas, maka dapat diketahui bahwa tingkat kepatuhan para penunggak PBB-P2 di Kota Batu dalam program

sunset policy masih rendah. Seperti yang diungkapkan oleh informan sebelumnya, bahwa memang sedikit warga yang memanfaatkan program tersebut. Kemudian, hal ini didukung juga dengan temuan data sekunder yaitu pada tabel 5 dimana target tunggakan yang ingin dihapuskan dari 176,715 SPPT kemudian pada tabel 6 tepatnya di bulan dilaksanakannya program *sunset policy* PBB-P2 di Kota Batu hanya ada pelunasan tunggakan sebesar 10.929 SPPT Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai penunggak PBB-P2 di Kota Batu menjadikan faktor penghambat dalam pelaksanaan program *sunset policy* PBB-P2 di Kota Batu.

2) Faktor Internal

a) Sumber daya pendanaan

Misroji (2014) mengemukakan bahwa sumber daya pendanaan dilihat dengan adanya ketersediaan dana yang memadai dalam menjalankan kebijakan publik. Apabila dikaitkan dengan program *sunset policy* PBB-P2 di Kota Batu, seharusnya dalam pelaksanaan program tersebut didukung dengan pendanaan yang memadai, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa program *sunset policy* PBB-P2 di Kota Batu tidak didukung dengan adanya sumber daya anggaran. Berdasarkan hasil penelitian, alasan Badan Keuangan Daerah

(BKD) Kota Batu tidak memberikan anggaran dana dalam program tersebut, karena program tersebut tidak masuk dalam rencana program tahunan.

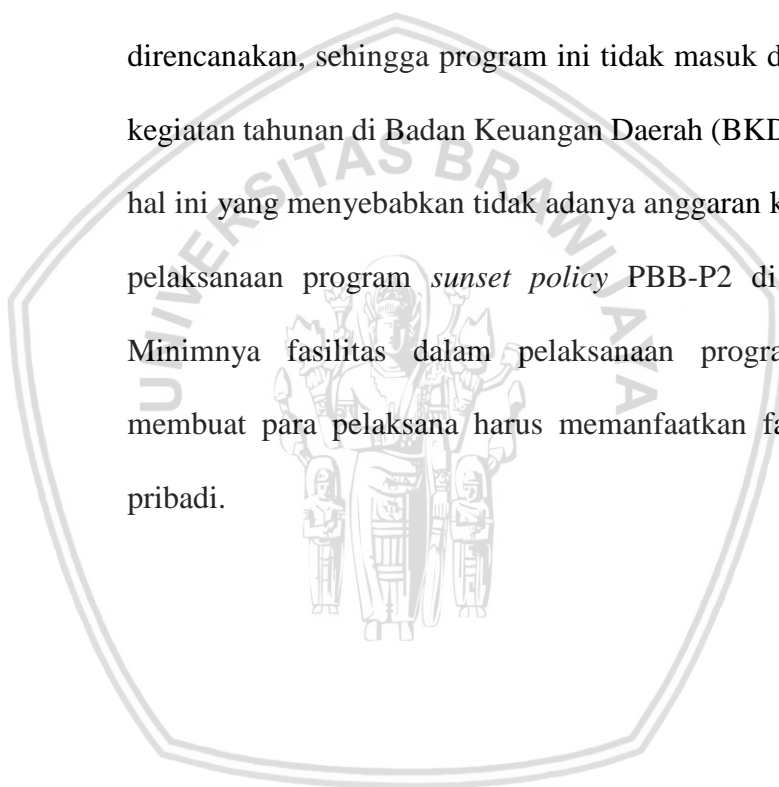
b) Jumlah personil

Grindle dalam Nurkhafidloh (2017) menyatakan bahwa “suatu proses implementasi kebijakan harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung keberhasilan dari kebijakan tersebut”. Menurut Nurkhafidloh (2017) “Salah satu sumber daya yang mendukung pelaksanaan program *sunset policy* adalah manusia itu sendiri’. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa jumlah sumber daya manusia dalam pelaksanaan program. Terbatasnya personil akan menghambat dalam pelaksanaan program *sunset policy* PBB-P2 di Kota Batu, sehingga memungkinkan dalam pelaksanaan program tersebut tidak berjalan secara optimal.

c) Sumber daya fasilitas

Misroji (2014) menyatakan bahwa sumber daya fasilitas tercermin dengan adanya sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan program. Apabila dikaitkan dengan program *sunset policy* PBB-P2 di Kota Batu, pengertian tersebut mengindikasikan bahwa minimnya sumber adanya fasilitas akan mempengaruhi pelaksanaan program *sunset policy* PBB-P2 di Kota Batu.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya fasilitas dalam pelaksanaan program *sunset policy* PBB-P2 di Kota Batu masih minim, hal tersebut dikarenakan tidak ada anggaran untuk program *sunset policy* PBB-P2 di Kota Batu. Salah satu alasan kenapa tidak ada anggaran untuk program *sunset policy* yaitu karena sebelumnya program ini tidak direncanakan, sehingga program ini tidak masuk dalam agenda kegiatan tahunan di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu, hal ini yang menyebabkan tidak adanya anggaran khusus dalam pelaksanaan program *sunset policy* PBB-P2 di Kota Batu. Minimnya fasilitas dalam pelaksanaan program tersebut, membuat para pelaksana harus memanfaatkan fasilitas milik pribadi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil akhir dari pelaksanaan suatu penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai “Efektivitas Program *Sunset Policy* sebagai Upaya Penurunan Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Batu”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Efektivitas Program *Sunset Policy* PBB-P2 di Kota Batu dilihat dari 4 (empat) indikator menunjukkan bahwa :

- a. Ketepatan sasaran program

Wajib Pajak sebagai penunggak PBB-P2 merupakan sasaran utama dalam pelaksanaan program *sunset policy* PBB-P2 di Kota Batu, mereka memiliki peran penting dalam mensukseskan pelaksanaan program tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, peran serta Wajib Pajak PBB-P2 masih kurang, hal ini dikarenakan hanya beberapa saja Wajib Pajak yang memanfaatkan program ini. Hal ini berarti indikator sasaran program dalam kaitannya untuk mengukur tingkat efektivitas masih belum efektif.

- b. Sosialisasi program

Melalui sosialisasi kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu memperkenalkan program *sunset policy* PBB-P2 kepada masyarakat Kota Batu. Berdasarkan hasil penelitian, sosialisasi program *sunset policy* PBB-P2 di Kota Batu dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Secara

umum, pelaksanaan sosialisasi langsung maupun tidak langsung telah dilakukan dengan optimal, dimana hal tersebut dilakukan dengan membangun hubungan baik antar pihak yang terlibat untuk saling bekerjasama dalam melakukan sosialisasi program ini.

c. Tujuan program

Tujuan adanya program *sunset policy* PBB-P2 di Kota Batu ini adalah untuk menghapuskan nilai tunggakan PBB-P2 di Kota Batu melalui program penghapusan sanksi denda. Berdasarkan hasil penelitian, tidak semua tunggakan berhasil dihapuskan, artinya masih terdapat tunggakan PBB-P2 ketika program telah selesai dijalankan. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa tujuan program masih belum tercapai. Hal ini mengindikasikan bahwa indikator ketepatan tujuan program guna mengukur tingkat efektivitas program masih belum efektif.

d. Pemantauan program

Indikator pemantauan program yang dimaksudkan disini adalah ada atau tidaknya pemantauan dilakukan setelah program dilaksanakan. Pemantauan program setelah program dijalankan dapat dilihat dari ada tidaknya pemberian sanksi. Berdasarkan hasil penelitian tidak ada pemberian sanksi terhadap para penunggak PBB-P2 yang masih belum melunasi tunggakan pajaknya. Hal ini berarti, indikator pemantauan program guna mengukur tingkat efektivitas program masih belum efektif.

2. Faktor pendukung yang berasal dari sisi eksternal yang menjadi faktor pendukung yaitu adanya kerjasama yang baik antara Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu dengan aparaturnya di Kota Batu dalam mensukseskan pelaksanaan program, kemudian adanya perkembangan teknologi yang sangat membantu dalam pengelolaan data-data tunggakan PBB-P2 di Kota Batu. Adapun dari sisi internal yaitu adanya regulasi pemerintah yang menunjang legalitas aktivitas pelaksanaan program *sunset policy* PBB-P2 di Kota Batu, adanya standar operasional yang berperan sebagai pedoman pelaksanaan bagi para pelaksana program *sunset policy* PBB-P2 di Kota Batu, serta adanya kemampuan dan pengetahuan para pelaksana program turut mendukung pula dalam pelaksanaan program ini.
3. Faktor penghambat yang berasal dari sisi eksternal, faktor penghambat meliputi lokasi tempat tinggal para penunggak PBB-P2 yang jauh dari kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu serta tidak ditemuinya penunggak pajak di lokasi, kemudian kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak, hal ini dilihat dari sedikitnya para penunggak PBB-P2 yang melakukan kewajiban perpajakannya yaitu melapor dan melunasi tunggakan pajaknya. Kemudian dari sisi internal yaitu tidak adanya anggaran dalam pelaksanaan program, kurangnya jumlah personil dalam pelaksanaan program, dan sarana prasarana yang kurang.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan analisis yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk *sunset policy* PBB-P2 yang selanjutnya, pihak BKD Kota Batu perlu meningkatkan koordinasi dengan para pihak terkait terutama tokoh masyarakat dan aparatur desa. Hal ini dapat memudahkan kegiatan sosialisasi yang jangka panjangnya akan meningkatkan kepatuhan para wajib pajak, selain itu kerjasama yang optimal antara pemda Kota Batu dengan aparatur desa dapat memudahkan wajib pajak dalam memanfaatkan program *sunset policy* PBB-P2.
2. Perlu diusahakan pencatatan data piutang PBB-P2 dengan akurat, agar *update* data tunggakan PBB-P2 bisa terus diikuti oleh pihak BKD itu sendiri. Hal ini juga dimaksudkan agar diketahui tingkat pencapaian program *sunset policy* PBB-P2 di Kota Batu.
3. Pihak BKD Kota Batu perlu melakukan penagihan aktif kepada masyarakat yang masih memiliki tunggakan PBB-P2, hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir tunggakan PBB-P2.
4. Untuk *sunset policy* PBB-P2 yang selanjutnya, pihak BKD Kota Batu perlu memberikan sanksi bagi wajib pajak yang masih enggan melakukan kewajiban perpajakannya, hal ini dimaksudkan guna memberikan efek jera kepada penunggak PBB-P2. Hal ini juga sebagai bentuk pemantauan terhadap program setelah dilaksanakannya program (*feed back control*).
5. Untuk *sunset policy* PBB-P2 yang selanjutnya, pihak BKD Kota Batu perlu memenuhi kebutuhan dari segi sumber daya, seperti sumber daya pendanaan (anggaran) yang cukup, jumlah sumber daya manusia yang cukup, dan sumber daya fasilitas yang memadai, mengingat hal ini penting guna menunjang keberhasilan pelaksanaan program *sunset policy*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 2012. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta : PT.Bumi Aksara
- Almilia, Luciana Spica dan Lindianasari. 2009. *Mozaik Perspektif Teori Organisasi*. Yogyakarta:Kanisius
- Amirullah. 2015. *Manajemen Strategi Teori-Konsep-Kinerja*. Jakarta : Mitra Wacana Media
- Anggraini, Devi Septya, Mochammad Al Musadieg, dan Dwiatmanto. 2016. Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak. *Jurnal Universitas Brawijaya Malang*. Vol.8, No.1
- Assauri, Sofjan. 2016. *Strategic Manajemen Sustainable Competitive Advantages*. Jakarta : Rajawali Pers
- Avitasari, Nadya. 2016. *Efektivitas Program Pelestarian Budaya Reog Ponorogo*. Skripsi. Program Sarjana, Universitas Brawijaya Malang
- Badan Pusat Statistik Kota Batu. 2016. *Statistik Daerah Kota Batu 2016*. Nomor : 1102001.8579 (Katalog)
- Budiani, Ni Wayan. 2007. Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumatera kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Universitas Udayana Bali*. Vol.2, No.1
- Citraningrum, Fifin. 2013. Efektivitas Hukum Pengenaan Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan terkait dengan Peralihan Hak Milik atas Jual Beli Tanah dan Bangunan. *Jurnal Universitas Brawijaya Malang*
- Dharmawan, Robbi. 2016. *Analisis Pelaksanaan Pemutakhiran Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batu*. Skripsi. Program Sarjana, Universitas Brawijaya Malang
- Direktorat jenderal Pajak. 2017. “Desentralisasi Fiskal Seutuhnya”. www.kemenkeu.go.id. Diakses pada tanggal 14 Oktober 2017
- Fasmi, Lasnofa dan Fauzan Misra. 2014. Modernisasi sistem Administrasi Perpajakan dan Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. *Jurnal Universitas Andalas Padang*. Vol.5, No.1

- Fitrianingsih, Riskha Ayu. 2016. *Intensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang*. Skripsi. Program Sarjana, Universitas Brawijaya Malang
- Halim, Abdul dan Muhammas Syam Kusufi. 2014. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta Salemba Empat
- Haryanto, Joko Haryanto, 2012. “*Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai Pajak Darah*”. <https://pajak.go.id>. Diakses pada tanggal 16 Oktober 2017.
- Hendrawan, Faizal. 2016. *Efektivitas Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.011/2011 terhadap Pihak importir Film Blu-Ray yang Digunakan Untuk Kepentingan Pribadi*. Skripsi. Program Sarjana, Universitas Brawijaya Malang
- Jamil, Nur Asyiah. 2017. Efektivitas Penerapan Tax Amnesty di Indonesia. *Jurnal IAIN Surakarta*. Vol.1, No.1
- Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1381 tentang hapusnya perikatan
- Kodir. Abd. 2016. *Efektivitas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pemberian Keringanan dan Insentif Pajak Daerah untuk Rakyat Jawa Timur Tahun 2015*. Skripsi. Program Sarjana, Universitas Brawijaya Malang
- Marantika, Reni. 2014. *Efektivitas Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) Perspektif Governance*. Skripsi. Program Sarjana, Universitas Brawijaya Malang. Vol.2, No.9
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : Andi
- Misroji. 2014. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyebaran Informasi Publik Mengenai Depok Cyber City Pada Diskominfo Kota Depok*. Tesis. Program Pasca Sarjana, Universitas Esa Unggul Depok
- Muin, Fatkhul. 2014. Otonomi Daerah dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah. *Jurnal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang*
- Nazarudin. 2014. Pengaruh Koordinasi dan Pengawasan terhadap Efektivitas Organisasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Cianjur. *Tesis Universitas Pasundan Bandung*

- Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Nisa, Laylia Khoirun. 2009. Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. *Jurnal Universitas Sebelas Maret Surakarta*
- Nurkhafidloh, Saadilah. 2017. *Sunset Policy Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kota Malang*. Skripsi. Program Sarjana, Universitas Brawijaya Malang
- Pamuji, Kadar. 2014. Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah dalam Kerangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Jurnal Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto*
- Peraturan Walikota Batu Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penghapusan Sanksi Administratif atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Masa Pajak sampai dengan Tahun 2015
- Peraturan Walikota Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Batu
- Pohan, Chairil Anwar. 2014. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta : Gramedia
- Putra dan Sugi Rahayu. 2016. Efektivitas Pelaksanaan Program DB4MK dalam Penurunan Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Desa Banguntapan, Banguntapan. *Jurnal UNY Bantul*
- Rahayu, Siti Kurnia. 2013. *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat
- Rini, Dessy Puspa. 2015. Efektivitas Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kota Kediri. *Jurnal Universitas Brawijaya Malang*
- Saragih, JP. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi* Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sari, Putri Puspita. 2016. *Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Disparitas Pendapatan provinsi Lampung Tahun 2001-2014*. Skripsi. Program Sarjana, Universitas Lampung
- Sawitri. 2016. Pengaruh Teknologi Informasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Efektivitas Penggunaan dan Kepercayaan Teknologi Informasi terhadap Kinerja Individual. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta*

- Siahaan, Marihot Pahala. 2016. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung : Alfabeta
- Sumarsan, Thomas. 2015. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Indeks
- Suryarini dan Syaiful Anwar (2013). Dampak Kebijakan Sunset Policy terhadap Kemauan Membayar Pajak pada KPP Semarang Barat. *Jurnal Dinamika Akuntansi*
- Syarbaini, Syahril dan Rusdiyanta. 2013. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Yohanes, Netty Herawati, dan Lina Sunyata. 2013. Strategi Penerapan Teknologi Informasi di Pemerintah Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Universitas Tanjungpura Pontianak*

